

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TELUK BINJAI
KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh:
RAYUN RAMADHAN
187321004

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian komprehensif
Guna memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Rayun Ramadhan
NPM : 187321004
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : **KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TELUK BINJAI KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN**


Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana,
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

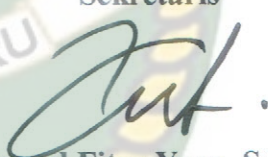
Hari : Rabu
Tanggal : 22 April 2020
Pukul : 11.00-12.00 WIB

**Dan dinyatakan LULUS
PANITIA PENGUJI TESIS**

Ketua

Sekretaris


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Anggota I

Anggota II


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si


Dr. Zainal, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau


Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa tesis yang berjudul :

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS
MASYARAKAT DI DESA TELUK BINJAI KECAMATAN TELUK
MERANTI KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh:

Nama : RAYUN RAMADHAN
NPM : 187321004
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk disidangkan.

Telah diperiksa dan disetujui
oleh Dosen Pembimbing untuk diujikan.

Pembimbing I

Tanggal... 26-03-2020


Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si

Pembimbing II

Tanggal... 26-03-2020


Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

**Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 – 7047726 Fax. (+62) (761) 674717**

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 212/KPTS/PPs-UIR/2020
TENTANG PERUBAHAN JUDUL PENULISAN TESIS MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN**

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS – UIR, maka perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
2. Bahwa berdasarkan dari hasil ujian seminar proposal yang telah dilaksanakan, Tim Penguji ujian seminar Proposal menyarankan perlu adanya perubahan dari judul tesis.
3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 37 Tahun 2009 Tentang Dosen.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018.
8. Peraturan Universitas Islam Riau Nomor : 001 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Akademik Bidang Pendidikan Universitas Islam Riau.
- Memperhatikan : Surat Permohonan perubahan judul tesis dari saudara Rayun Ramadhan tanggal 30 April 2020 yang berdasarkan dari usulan tim penguji seminar proposal tanggal 05 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menunjuk :

No	Nama Dosen Pembimbing	Jabatan Fungsional	Bertugas Sebagai
1	Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.	Lektor	Pembimbing I
2	Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A.	Lektor	Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : **RAYUN RAMADHAN**

N P M : **18 732 1004**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Judul Tesis Lama : "PERAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten pelalawan)"

Judul Tesis Baru : "KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TELUK BINJAI KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN."

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
5. Mencabut SK Direktur sebelumnya NOMOR : 393/KPTS/PPS-UIR/2019 tertanggal 25 Juli 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 11 Mei 2020

Direktur,



Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum.

NIP: 1954080819870110029

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru

2. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumentasi adalah Arsip Milik :



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rayun Ramadhan
NPM : 187321004
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. _____ Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Islam Riau maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. _____ Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. _____ Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali berupa kutipan dengan menyebutkan nama pengarang secara jelas dan dicantumkan di dalam daftar pustaka.
4. _____ Pernyataan ini saya buat dalam dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian haru terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dari apa yang saya nyatakan di atas (poin 1-3), maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan nilai ujian tesis dan/atau pencabutan gelar akademik magister dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.

Pekanbaru, 9 April 2020
Yang Membuat Pernyataan




Rayun Ramadhan



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 379/A-UIR/5-PSTK/PPs/2020

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Rayun Ramadhan
NPM : 187321004
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 14 April 2020 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan


Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 14 April 2020

Staf Perpustakaan


Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI DESA TELUK BINJAI KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN

by Rayun Ramadhan

From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis 2)

- Processed on 13-Apr-2020 11:51 +08
- ID: 1296171000
- Word Count: 16163

Similarity Index

26%

Similarity by Source

Internet Sources:

25%

Publications:

7%

Student Papers:

24%

sources:

- 1 2% match (Internet from 16-Oct-2019)
<http://digilib.unila.ac.id/11424/15/BAB%20II.pdf>
- 2 2% match (Internet from 24-Dec-2018)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/59532/Chapter%20II.pdf;sequence=4>
- 3 2% match (Internet from 09-Jan-2020)
<https://idih.gianyarkab.go.id/storage/app/uploads/public/5aa/5f3/45d/5aa5f345defcd367717848.pdf>
- 4 2% match (Internet from 24-May-2019)
<https://scdblackandyellow.blogspot.com/>
- 5 2% match (Internet from 23-Jan-2020)
<https://www.scribd.com/document/375965820/1-pedomanumumpamsimas-23mei2013ff1civr-160108222810-pdf>
- 6 1% match (student papers from 11-Jan-2017)
[Submitted to iGroup on 2017-01-11](#)
- 7 1% match (Internet from 16-Feb-2020)
<https://konsultasiskripsi.com/tag/konsultasi-tesis-jogja/page/6/>
- 8 1% match (Internet from 30-Nov-2019)
<https://curricicdn.s3-us-west-2.amazonaws.com/resourcefiles/54d3400ae55b7.doc>
- 9 1% match (Internet from 15-May-2019)
<https://pt.scribd.com/document/348371141/Chapter-II-pdf>
- 10 1% match (Internet from 09-May-2015)
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/19197/1/DEDE%20ILYAS-FDK.pdf>
- 11 1% match (Internet from 11-Oct-2017)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/61017/Chapter%20I.pdf?isAllowed=y&sequence=4>
- 12 1% match (Internet from 16-Nov-2015)
http://beta.new.pamsimas.org/data/download/P-1%20Pedoman%20Umum%20Pengelolaan%20Program%20Pamsimas_FIN09%20%20%202015_WEB.pdf

**KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI
DESA TELUK BINJAI KECAMATAN TELUK MERANTI KABUPATEN
PELALAWAN**

RAYUN RAMADHAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (Pamsimas) di desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Pelaksanaan program Pamsimas di Desa Teluk Binjai tidak berjalan sebagaimana mestinya dan pada tahun 2018-2019 terjadi penurunan jumlah jamban sehat padahal jamban sehat merupakan salah satu tujuan dari program pamsimas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan masih lemah. Hal ini dilihat dari tiga indikator yaitu *policy capacity*, *Implementation capacity* dan *operational efeciency*. Dari ketiga indikator tersebut terlihat belum ada proses kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, tidak adanya penganggaran dana pamsimas sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan pelaksanaanya dan sarana yang tersedia belum berjalan secara efisien.

Kata Kunci: Kapasitas, Pamsimas

***THE CAPACITY OF VILLAGE GOVERNMENT IN IMPLEMENTATION OF
COMMUNITY-BASED DRINKING WATER AND SANITATION PROGRAMS
AT TELUK BINJAI VILLAGE, TELUK MERANTI DISTRICT, PELALAWAN
REGENCY***

RAYUN RAMADHAN

ABSTRACT

This study aims to determine the capacity of the Village Government in the implementation of community-based drinking water and sanitation (Pamsimas) programs at Teluk Binjai village, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency. The implementation of Pamsimas program at Teluk Binjai Village did not work as it should and in 2018-2019 there was a decrease in the number of healthy latrines even though healthy latrines were one of the objectives of the pamsimas program. This study uses qualitative methods and types of descriptive research with data collection done by interviews, observations and documentation. The results showed the capacity of the Village Government in implementing the Community-based drinking water and sanitation program in the village of Teluk Binjai, Teluk Meranti District, Pelalawan Regency was still weak. This is seen from three indicators namely policy capacity, Implementation capacity and operational efficiency. From the three indicators, it appears that there is no policy process carried out by the Village Government, there is no budgeting of the pamsimas fund of 10% of the Village Revenue and Expenditure Budget and the implementation and available facilities have not run efficiently.

Keywords: Capacity, Pamsimas

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur Penulis mengucapkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan berkah rahmat dan inayah-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis bisa menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Kapasitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”**. Serta shalawat dan salam Penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membuka mata hati dan pikiran kita akan pentingnya ilmu pengetahuan.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan pada Program Pascasarjana Universitas Islam Riau. Ketika proses pelaksanaan penyusunan Tesis ini berlangsung, banyak pihak yang telah membantu Penulis baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Yusri Munaf, S.H., M.Hum selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing II yang

telah meluangkan waktu, membimbing dan memberi arahan kepada Penulis dalam proses awal hingga terwujudnya Tesis ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Khususnya kepada Dosen jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan sokongan baik secara moril maupun materil kepada Penulis.
7. Seluruh Staf/Pegawai di Program Pascasarjana, khususnya kepada Staf/Pegawai yang bertugas pada jurusan Magister Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama Penulis melaksanakan perkuliahan.

Demikianlah yang dapat Penulis sampaikan, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini mengingat tenaga dan ilmu serta keterbatasan waktu. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun demi kesempurnaan tesis ini. Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 9 April 2020

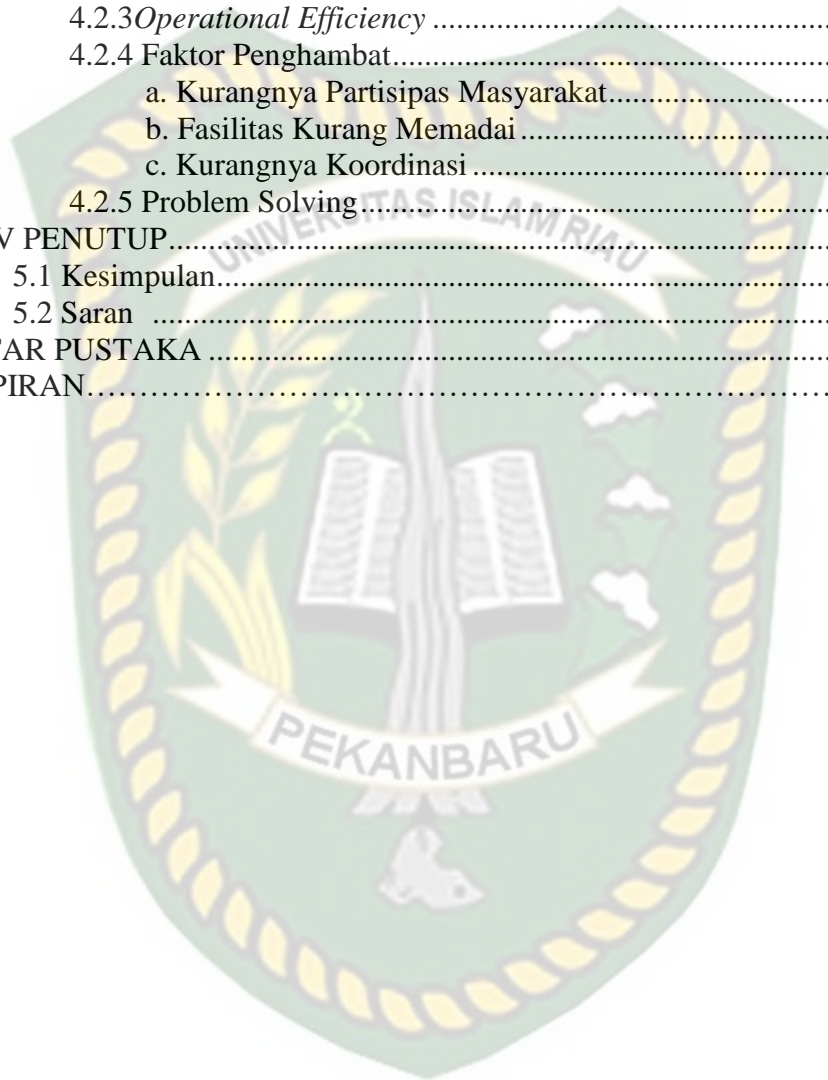
Penulis,

Rayun Ramadhan

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Tim Penguji	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Turnitin.....	iv
Lembar Persembahan	v
Lembar Tunjuk Ajar.....	vi
Riwayat Hidup Penulis.....	vii
<i>Abstract</i>	viii
Abstrak	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel	xiv
Daftar Bagan	xv
Daftar Gambar.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	14
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Praktis.....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	16
2.1 Konsep Teori.....	16
2.1.1 Ilmu Pemerintahan.....	16
2.1.2 Pemerintahan	27
2.1.3 Pemerintah Desa	30
2.1.4 Pengembangan.....	38
2.1.5 Kapasitas.....	44
2.2 Ulasan Karya.....	52
2.3 Kerangka Pemikiran.....	54
2.4 Konsep Operasional	55
2.5 Operasional Variabel	57
BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN	59
3.1 Metode Penelitian	59
3.2 Informan Penelitian.....	60
3.3 Jenis dan Sumber Data	60
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.5 Teknik Analisis Data	62
3.6 lokasi Penelitian	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	66

4.1.1 Program Pamsimas di Desa Teluk Binjai.....	66
4.1.2 Sejarah dan Monografi Desa.....	68
4.2 Pembahasan.....	71
4.2.1 <i>Policy Capacity</i>	71
4.2.2 <i>Implementation Authority</i>	77
4.2.3 <i>Operational Efficiency</i>	83
4.2.4 Faktor Penghambat.....	89
a. Kurangnya Partisipas Masyarakat.....	89
b. Fasilitas Kurang Memadai.....	92
c. Kurangnya Koordinasi.....	92
4.2.5 Problem Solving.....	93
BAB V PENUTUP.....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN.....	102



Daftar Tabel

Tabel 1Keberfungsian Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi	
Desa Teluk Binjai Tahun 2018.....	10
Tabel 2 Jumlah Jamban sehat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk	
Meranti Kabupaten Pelalawan 2018-2019	11
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Aparatur Desa Teluk Binjai Tahun 2019.....	12
Tabel 4 Data Informan Penelitian	60
Tabel 5 Jenis Kegiatan PUPR di APBDes Teluk Binjai.....	80

Daftar Bagan

Bagan 1 Organisasi dan Pengelola Program Pamsimas 7



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Daftar Gambar

Gambar 4.1 Kondisi Bangunan Pamsimas Desa Teluk Binjai.....	82
Gambar 4.2 Kondisi MCK Desa Teluk Binjai.....	91



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, Indonesia dibagi menjadi beberapa tingkatan yang disebut sebagai Pemerintah daerah yaitu Provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat paling bawah yaitu pemerintah desa. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebagai lembaga pemerintah, desa merupakan lembaga yang memperkuat lembaga pemerintah nasional karena desa merupakan kesatuan masyarakat hukum adat terpelihara dengan baik sepanjang keberadaannya. Dalam hierarki pemerintahan, desa merupakan penyelenggara pemerintahan yang paling rendah dan dekat dengan masyarakat. Untuk itu penyelenggaraan pemerintah desa harus mendapat perhatian guna mempercepat lajunya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa dan kawasan pedesaan secara komprehensif merupakan faktor penting bagi pembangunan daerah, Pengentasan kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberikan peluang dan harapan bagi desa untuk mendapatkan perhatian lebih besar bagi pemerintah baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mempercepat pembangunan.

Menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan keluarnya Undang-undang nomor 6 tersebut, menjadikan desa tidak hanya sebagai obyek dari sasaran pembangunan melainkan menjadi subjek dan berperan aktif sebagai motor penggerak dalam pembangunan. Selain itu desa juga tidak hanya menjadi lokus pembangunan, tetapi juga sebagai perancang pembangunan yang sesuai dengan potensi kebutuhannya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kapasitas Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Demi terwujudnya pembangunan di desa yang efektif dan efisien tentunya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan yang matang. Dengan memperhitungkan potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dalam arti sumberdaya manusia seperti perangkat desa yang professional baik itu dari segi pendidikan, pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Negara menjamin hak setiap warga untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kebutuhan yang sehat, bersih dan produktif. hal tersebut berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. Air bersih merupakan salah satu kebutuhan yang sangat vital bagi semua manusia. Karena segala aktivitas masyarakat di berbagai aspek kehidupan manapun memerlukan air bersih. Tersedianya air bersih adalah mutlak untuk menunjang hidup yang sehat.

Pada pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 Tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) juga menyebutkan bahwa pengembangan SPAM harus diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan (sanitasi) untuk menjamin keberlanjutan. SPAM diselenggarakan dengan tujuan untuk:

- a. Tersedianya pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum;
- b. Terwujudnya pengelolaan dan pelayanan Air Minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau;
- c. Tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dan BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok Masyarakat, dan Badan Usaha; dan
- d. Tercapainya penyelenggaraan Air Minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dalam pasal 2 menyebutkan bahwa penyediaan

air minum dan sanitasi dilakukan dengan prinsip non diskriminatif, terjangkau, perlindungan lingkungan, berkelanjutan, partisipasi masyarakat, dan keterpaduan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) menjelaskan tentang wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan SPAM.¹ Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah desa adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan dukungan terhadap pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPAM di tingkat kelompok masyarakat;
- b. Memfasilitasi pelaporan kelompok masyarakat kepada pemerintah kabupaten/kota; dan
- c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPAM di wilayahnya kepada pemerintah kabupaten/kota.

Salah satu langkah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah melalui Program Pamsimas. Program Pamsimas merupakan program andalan pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat bagi masyarakat miskin di pedesaan.² Pamsimas juga merupakan salah satu program dan aksi nyata pemerintah (pusat dan daerah) dengan dukungan Bank Dunia yang bertujuan untuk meningkatkan praktik hidup bersih dan sehat di masyarakat, meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal

¹ Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air minum (SPAM)

² Buku Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Program Pamsimas edisi 2013

(pemerintah daerah maupun masyarakat) dalam penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dan meningkatkan efektivitas dan berkesinambungan jangka panjang pembangunan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi untuk pencapaian target akses universal air minum dan sanitasi, program Pamsimas dilanjutkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 khusus untuk desa-desa di Kabupaten program ini dilaksanakan di 4583 desa yang tersebar pada 365 kabupaten. Program Pamsimas III dilaksanakan untuk mendukung dua agenda nasional untuk meningkatkan cakupan penduduk terhadap pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, yaitu (1) 100-100, yaitu 100% akses air minum dan 100% akses sanitasi, dan (2) sanitasi total berbasis masyarakat.

Sasaran program Pamsimas adalah Kabupaten yang memiliki cakupan pelayanan air minum aman perdesaan yang belum mencapai 100%. Penetapan Kabupaten sasaran dilakukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan minat Pemerintah Kabupaten, sedangkan pemilihan desa sasaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan. Target desa sasaran program Pamsimas adalah kurang lebih 27.000 desa (2008-2020).

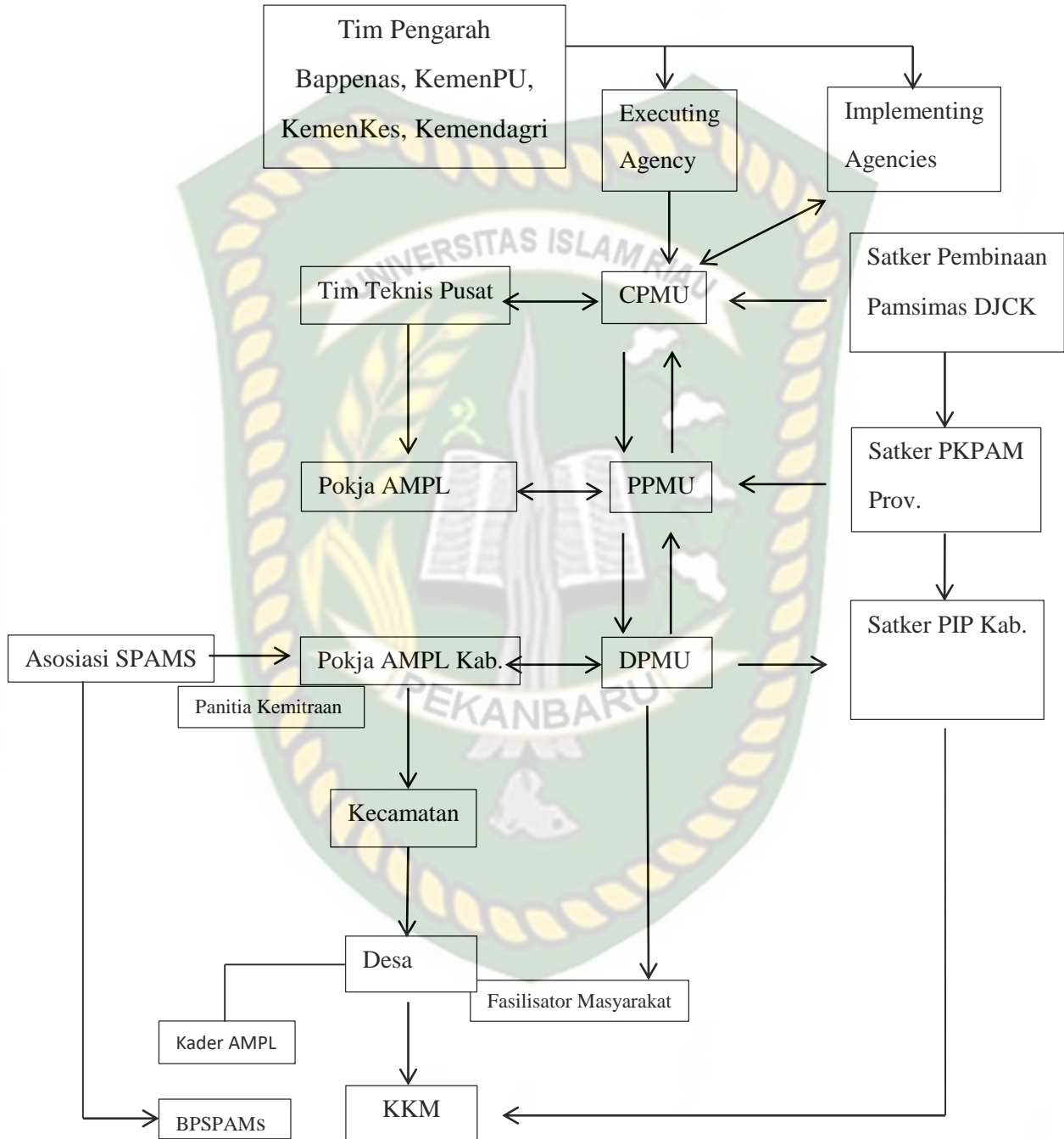
Secara umum, kriteria desa sasaran Pamsimas meliputi:

1. Belum pernah mendapatkan program Pamsimas;

2. Cakupan akses air minum aman masih rendah; yaitu di bawah 68.87%;
3. Cakupan akses sanitasi aman masih rendah; yaitu di bawah 62.41%;
4. Prevalensi penyakit diare (atau penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan) tergolong tinggi berdasarkan data Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
5. Memenuhi biaya per penerima manfaat yang efektif dan efisien;
6. Adanya pernyataan kesanggupan masyarakat untuk:
 - a. Menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) selanjutnya disebut dengan Kader AMPL minimal 3 orang;
 - b. Menyediakan kontribusi sebesar minimal 20% dari kebutuhan biaya RKM, yang terdiri dari 4 % (*incash*) dan 16 % (*inkind*);
 - c. Menghilangkan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Pendanaan program Pamsimas melalui sumber dana Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dana kontribusi masyarakat.

Bagan 1.1
Bagan Organisasi dan Pengelola Program Pamsimas



Sumber: Buku Juknis Pamsimas 2013

Bagan di atas merupakan bagan organisasi dan pelaksana dalam program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dari tingkat pusat sampai dengan masyarakat. Dalam bagan tersebut program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dimulai dari pusat yang terdiri dari Bappenas, KemenPU, KemenKes, Kemendagri. Di pusat terdapat beberapa organisasi pelaksana. yang pertama adalah *executing Agency* yang merupakan Direktorat Jendral Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum. Kedua, *Implementing Agency* merupakan Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah (Bangda). Ketiga, CPMU adalah *Central Project Management Unit* berkedudukan di Ditjen Cipta Karya yang terdiri dari perwakilan berbagai instansi yang terlibat dengan program Pamsimas.

Selanjutnya pada tingkat Provinsi terdiri dari Pokja AMPL, PPMU. Pokja AMPL dibentuk berdasarkan SK Gubernur yang diketuai oleh kepala Bappeda Provinsi sedangkan PPMU adalah *Provincial Project Management Unit* yang ditetapkan dengan SK Gubernur, ketuanya berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau dengan nama lain yang menangani bidang Cipta Karya. Pada tingkat Kabupaten terdiri dari Pokja AMPL Kabupaten dan DPMU. Pokja AMPL Kabupaten dibentuk berdasarkan SK Bupati atau Walikota yang diketuai oleh Kepala Bappeda Kabupaten/kota dan beranggotakan Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Kesehatan, Bapeldalda, Dinas Pendidikan, dan Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan kelompok peduli AMPL, dan wakil organisasi masyarakat sipil. Yang terakhir adalah tingkat Desa terdiri dari KKM dan BPSPAMS. KKM adalah Kelompok Keswadayaan Masyarakat yang terdiri dari anggota masyarakat

yang dipilih dari desa yang bersangkutan secara demokrasi, partisipatif, transparan, akuntabel, berbasis nilai, memperhatikan kesetaraan gender, keberpihakan kepada kelompok rentan dan terisolasi serta kelompok miskin. Yang terakhir adalah BPSPAMS merupakan Badan pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengelola pembangunan sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta penanggulangan kemiskinan. Adapun lingkup pembangunan desa antara lain: pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan sarana dan prasarana, termasuk di dalamnya air minum dan sanitasi. Salah satu pembangunan desa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah pembangunan lokal skala desa melalui konsep desa membangun, dimana pendekatan ini didukung oleh pemerintah desa dan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan amanat Undang-undang seperti diuraikan di atas, pemerintah desa memainkan peran yang sangat penting dalam menyelenggarakan pembangunan di tingkat desa, termasuk pembangunan di bidang air minum dan sanitasi. Sehingga dalam pelaksanaan program Pamsimas tingkat desa sangat diharapkan adanya peran dari pemerintah desa untuk mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program.

Salah satu desa yang mendapat program Pamsimas adalah Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan pada tahun 2015. Pada tahun 2015

Sarana Penyediaan Air Minum dan Sarana Sanitasi di Desa Teluk Binjai dibangun beberapa sarana dari program Pamsimas, tetapi sarana yang telah dibangun tidak berfungsi sama sekali sampai saat ini. Berikut adalah sarana yang tidak berfungsi pada pelaporan 2018:

Tabel 1.1
Keberfungsian Sarana Penyediaan Air Minum Dan Sarana Sanitasi Desa Teluk Binjai Tahun 2018

Jenis SPAM yang dibangun	Jumlah Sarana	Status Keberfungsian Sarana	Status Keberfungsian
PMA	1 unit	Tidak Berfungsi	Merah
Tower	1 unit	Tidak Berfungsi	
Kran Umum	1 unit	Tidak Berfungsi/Rusak	
Mesin Pompa + Diesel	1 unit	Tidak Berfungsi/Rusak	

Sumber: Survei awal Penulis

Selain pengadaan sarana prasarana untuk menunjang akses air bersih bagi masyarakat. Program pamsimas juga mempunyai tujuan yaitu perilaku hidup sehat dan bersih. Salah satunya adalah dengan pengadaan dan edukasi jamban sehat bagi masyarakat supaya masyarakat terhindar dari penyakit yang disebabkan perilaku masyarakat yang membuang hajat sembarangan seperti di sungai dan parit.

Pada masyarakat pedesaan masih sering dijumpai terutama yang bermukim dekat dengan sungai masih banyak yang berperilaku kurang sehat dengan buang air besar disungai, dan lain sebagainya. salah satu penyebab masyarakat melakukan buang air besar di sungai adalah rendahnya motivasi masyarakat untuk berperilaku

hidup bersih, sehat dan sebagian masyarakat belum memiliki fasilitas buang air besar yang layak seperti MCK (Mandi Cuci Kakus), sehingga masyarakat menggunakan sungai untuk buang air besar, kebiasaan seperti ini sangat merugikan kesehatan masyarakat karena banyak warga yang melakukan aktivitas di sungai seperti mandi dan mencuci baju. Berikut adalah data jamban di Desa Teluk Binjai:

Tabel 1.2
Jumlah Jamban sehat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan

Tahun	Jumlah KK	Permanen	Semi Permanen	Sharing
2018	178	74	40	64
2019	170	25	132	13

Sumber: sim.pamsimas.org diakses pada 6 Oktober Pukul 11.23 wib

Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwasannya pada tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan jumlah jamban permanen dan meningkatnya secara drastis jamban semi permanen. Padahal keberadaan jamban sehat sangat penting mengingat banyaknya penyakit yang timbul akibat perilaku buang air besar sembarangan. Sementara itu fenomena pada Kapasitas yang Pertama adalah Lemahnya Sumberdaya Manusia di Desa Teluk Binjai, Berikut adalah tingkatan Pendidikan Aparatur Desa di Desa Teluk Binjai:

Tabel 1.3
Tingkat Pendidikan Aparatur Desa

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Syamsuir	Kepala Desa	SMA/Sederajat
2.	Al-Ma'rif	Sekretaris Desa	SMA/Sederajat
3.	Riko	Kasi Pemerintahan	SMA/Sederajat
4.	Gustami	Kasi Kesejahteraan	SMA/Sederajat
5.	Rainah	Kasi Pelayanan	SMA/Sederajat
6.	Yen Kasmila	Kaur Umum	SMA/Sederajat
7.	Syukri Ananda	Kaur Perencanaan	Strata 1
8.	Suardi	Kaur Keuangan	SMA/Sederajat

Sumber: Struktur Organisasi Desa Teluk Binjai 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tingkat pendidikan dari Aparatur Desa Teluk Binjai dari 8 Jabatan utama hanya satu orang yang berpendidikan sarjana selebihnya hanya tamat SMA/Sederajat. Selain Sumberdaya manusianya kapasitas juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman Aparatur itu sendiri. Berangkat dari itu Penulis mencoba menanyakan perihal umum mengenai Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat tetapi mereka mengatakan tidak tahu mengenai hal tersebut. Selanjutnya pada system Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Penulis melihat adanya penghambat atau suatu pemahaman yang membingungkan masyarakat yaitu pada KKM dan BPSPAMS yang sama-sama dibetuk dan dipilih oleh masyarakat dan sama-sama mengontrol kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis

Masyarakat yang akan menimbulkan kecemburuan sosial pada masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kapasitas Pemerintah Desa Dalam Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian pada latar belakang dan fenomena-fenomena di atas. Maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kapasitas Pemerintah Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat ?
2. Faktor apa yang menyebabkan lemahnya kapasitas Pemerintah Desa di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dalam program Pamsimas ?

1.3 Batasan Penelitian

Untuk memperjelas dan membatasi ruang lingkup penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan hasil uraian yang sistematis dan tidak terjadinya keaburan tujuan penelitian maka penulis membatasi penelitian ini hanya membahas kapasitas Pemerintah Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten

Pelalawan dalam program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kapasitas Pemerintah Desa di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dalam program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat”.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Kapasitas Pemerintah Desa di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan program pamsimas”.

b. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis Penelitian ini merupakan salah satu bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara Praktis Menjadi masukan bagi Pemerintah Desa di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam mengevaluasi mengenai Kapasitas Pemerintah Desa di Desa

Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan program pamsimas.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

1.1 Konsep Teori

1.1.1 Ilmu Pemerintahan

Ilmu Pemerintahan merupakan ilmu terapan karena mengutamakan segi penggunaan dalam praktek, yaitu dalam hal hubungan antara yang memerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Teknik-teknik Pemerintahan adalah berbagai pengetahuan, kepandaian, dan keahlian tertentu dalam cara yang dapat ditempuh atau digunakan untuk melaksanakan dan menyelenggarakan berbagai peristiwa-peristiwa Pemerintahan. Untuk teknik Pemerintahan di Indonesia ada beberapa teknik yaitu: Defensiasi, Integrasi, Sentralisasi, Desentralisasi, Konsentrasi, Dekonsentrasi, Delegasi, Perwakilan, Pembantuan, Koperasi,, Koordinasi dan Partisipasi.¹ Menurut U. Rosenthal Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang penunjukkan cara kerja dari dalam keluar dan proses pemeritahan umum. Sedangkan menurut Ndraha, Ilmu Pemerintahan dapat didefenisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.²

¹ Inu Kencana Syafii, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Refika Aditama, 2001) hlm 48

² Inu Kencana Syafii, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Bumi aksara, 2014) hlm, 9

Menurut Musanef Ilmu Pemerintahan dapat didefenisikan sebagai berikut³:

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar, atau
- c. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Dari defenisi di atas dapat dapat kita konstruksikan mengenai ruang lingkup Ilmu Pemerintahan yaitu sebagai berikut:

³ Musanef. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm, 7-8

- a. Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah
- b. Adanya tuntutan yang diperintah (jasa publik dan jasa sipil)

Menurut Wasistiono, apabila dirunut awal kehidupan manusia, diperoleh pemahaman bahwa cikal bakal Ilmu Pemerintahan mulai dari hubungan antara Tuhan pencipta alam semesta dengan manusia yang diciptakannya. Dalam kitab suci diperoleh berbagai informasi bahwa Sang pencipta memberikan perintah kepada umat ciptaanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai perintahnya. Dalam hal ini sudah ada embrio pemerintahan yakni antara Tuhan sebagai penguasa alam semesta kepada manusia sebagai hambanya.⁴

Menurut Wasistiono dan Sumangusong Ilmu Pemerintahan memiliki objek materi sebagai berikut:

- a. Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu Negara, yakni pemerintahan berhubungan dengan rakyatnya dalam kaitan hak dan kewajibannya yang seimbang. Pemerintah mempunyai kewajiban dan hak kepada Negara. Sebaliknya warga Negara mempunyai hak dan kewajiban kepada Negara.
- b. Pola hubungan yang dilaksanakan antara pemerintah dan rakyatnya akan sangat tergantung pada bentuk Negara dan system politik yang dianutnya. Pada Negara demokrasi dengan azas *good governance*, hubungan antara rakyat dengan Pemerintahannya yang bersifat heterakhis. Antara rakyat,

⁴ Sadu Wasistiono, *Perkembangan Ilmu Pemerintahan* (Bandung: IPDN Press, 2017) hlm, 32

sector pemerintah dan sector swasta berkedudukan sejajar dengan fungsi yang berbeda.

Landasan Ontologi merupakan wujud hakiki, kahekat dari objek yang diamati/dikaji/ditelaah oleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Berdasarkan pengertian Ilmu Pemerintahan yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas, maka dapat kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara objek forma dari Ilmu Pemerintahan. Hal ini yang kemudian menjadikan kedudukan Ilmu Pemerintahan menjadi tidak jelas dan membingungkan. Hal ini disebabkan para ahli dalam memberikan defnisi tentang Ilmu Pemerintahan ini berdasarkan latar belakang ilmu-ilmu kenegaraan seperti ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum, dan lain-lain.

Ilmu Pemerintahan berasal dari kata ilmu dan pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tentang Ilmu Pemerintahan. Namun dari pengertian tersebut terdapat perbedaan pada objek forma Ilmu Pemerintahan, sedangkan objek materianya sama yaitu negara/pemerintah. Objek suatu ilmu pengetahuan menurut Inu Kencana² adalah sesuatu yang menjadi pokok pembicaraan, sehingga dengan demikian objek merupakan apa yang diamati, diteliti, dipelajari, dan dibahas. Objek materia dari suatu disiplin ilmu dapat sama dengan ilmu lain, karena bersifat umum dan merupakan topik yang dibahas secara global tentang pokok persoalan (*subject*

matter). Sedangkan objek forma bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian (*focus of interest*) suatu disiplin ilmu pengetahuan.⁵

Selanjutnya ia juga memberikan perbedaan dan persamaan ilmu-ilmu kenegaraan (yang terdiri dari Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara, Ilmu Hukum Tata Negara, Ilmu Negara) ditinjau dari objek material dan objek formanya. Persamaan dari ilmu-ilmu kenegaraan tersebut terletak pada objek materianya, yaitu Negara. Sedangkan, perbedaannya terletak kepada objek formanya. Objek forma dari Ilmu Politik adalah kekuasaan, kepentingan rakyat, grup penekan. Objek forma dari Ilmu Administrasi Negara adalah pelayanan, organisasi, manajemen, dan birokrasi. Objek forma dari Ilmu Hukum Tata Negara adalah peraturan perundang-undangan. Objek forma dari Ilmu Negara adalah konstitusi, timbul dan tenggelamnya negara. Dan objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah hubungan-hubungan pemerintahan, gejala, dan peristiwa pemerintahan.

Ilmu Pemerintahan lahir dan berkembang di Belanda pada awal Abad XX dengan nama *bestuurswetenschap* (artinya sama dengan Ilmu Pemerintahan) dan *bestuurskunde* (artinya sama dengan seni pemerintah).⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintahan itu suatu ilmu dan seni. Sebagai suatu ilmu, maka pemerintahan telah memenuhi syarat syarat suatu ilmu, seperti memiliki objek kajian, memiliki metodologi yang ilmiah, sistematis, dan universal. Dikatakan sebagai seni karena ada juga pemimpin pemerintahan/orang-orang yang berada dalam pemerintahan yang

⁵ Loc it., Hlm, 24

⁶ Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1983) Hlm, 160

tidak mempunyai latar-belakang pendidikan pemerintahan. Mereka ternyata mampu menjalankan roda pemerintahan. Kemampuan ini dapat dikatakan sebagai seni.

Di tahun 1970, dalam perkembangannya dikenal tiga sosok Ilmu Pemerintahan, yaitu Ilmu Pemerintahan, Ilmu-Ilmu Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan terapan. Yang dimaksud dengan Ilmu-ilmu Pemerintahan adalah ilmu-ilmu yang mempelajari tentang fenomena-fenomena pemerintahan, seperti manajemen pemerintahan, sosiologi pemerintahan, dan lain-lain. Sedangkan Ilmu Pemerintahan Terapan sama dengan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan. Ini berkaitan dengan fungsi pemerintah, yaitu pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan. Pemerintahan dikenal juga dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintahan dalam arti sempit meliputi eksekutif saja sebagai pelaksanaan roda pemerintahan. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif sebagai lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, dan yudikatif sebagai lembaga yang melaksanakan peradilan.

MacIver merumuskan pengertian Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara sistematis mempelajari pemerintahan suatu Negara dan tentang asal-mula terjadinya pemerintahan, serta kondisi yang ditimbulkan dari adanya bentuk-bentuk pemerintahan yang ada, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, mekanisme pemerintahan, kepemimpinan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan.⁷ Berdasarkan pendapat MacIver, objek forma dari Ilmu Pemerintahan sangat luas,

⁷ Dalam Franciscus Van Ylst, *Epistemologi Ilmu Pemerintahan*. Disertasi. (UI: Depok, 2008)
Hlm, 6

tidak spesifik pada satu *focus of interest*. Bayu Suryaningrat mengatakan bahwa Ilmu Pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat.⁸ Selanjutnya, ia juga mengemukakan bahwa Ilmu Pemerintahan ini mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah-laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan pemerintah. Berdasarkan pendapat ini, maka objek formasi dari Ilmu Pemerintahan adalah organisasi dan kebijakan pemerintahan. Berdasarkan pendapat ini maka objek formasi dari Ilmu Pemerintahan adalah kepemimpinan dalam pemerintahan. Taliziduhu Ndaha mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.⁹ Berdasarkan pengertian ini maka objek formasi dari Ilmu Pemerintahan adalah tujuan pemerintahan.

Inu Kencana Syafie mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala

⁸ Bayu Suryaningrat, *Mengenal Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: Aksara Baru, 1980) Hlm, 47

⁹ Taliziduhu Ndaha. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003) Hlm, 7

pemerintahan, secara baik dan benar.¹⁰ Berdasarkan pengertian ini maka objek forma dari Ilmu Pemerintahan adalah fungsi, hubungan hubungan pemerintahan.

Selanjutnya secara Epistimologi, Epistemologi merupakan proses dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang dimaksud. Mengkaji Ilmu Pemerintahan secara epistemologi dapat dilakukan melalui perkembangan Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Ilmu Pemerintahan seringkali dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang baru. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Taliziduhu Ndraha dimana Ilmu Pemerintahan (*bestuur wetenschap*) mengalami beberapa tahapan perkembangan. Tahap pertama, gejala pemerintahan dikaji melalui sudut pandang dan cara menurut ilmu yang ada dimasa itu sehingga objek itu menjadi ruang-lingkup dan dipelajari sebagai materia atau bagian integral disiplin lain. Seperti ilmu hukum, ilmu politik, sosiologi, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi. Tahap kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada. Sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan.¹¹

Ilmu Pemerintahan pada tahap awal seperti *bestuurskunde*, bersifat ideografk-elektis. Inilah awal Ilmu Pemerintahan generasi pertama. Tahap kedua, gejala pemerintahan dipelajari oleh disiplin ilmu pengetahuan yang ada. Sehingga terbentuklah spesialisasi disiplin yang bersangkutan. Misalnya ketika sosiologi mempelajari gejala pemerintahan maka lahirlah sosiologi pemerintahan. Sosiologi pemerintahan ini merupakan spesialisasi sosiologi. Tahap ketiga, terbentuk kelompok

¹⁰ Loc it., Hlm, 21

¹¹ Loc it., Hlm. 9-13

pengetahuan (*body of knowledge*) yang dikonstruksi dari konsep-konsep sumbangan disiplin ilmu yang spesifik tadi. Maka lahirlah disiplin Ilmu Pemerintahan elektis. Ilmu Pemerintahan pada tahap awal seperti *bestuurskunde*, bersifat ideografik-elektis. Inilah awal Ilmu Pemerintahan generasi pertama. Pada tahap keempat, lahirlah Ilmu Pemerintahan yang mandiri yang dikenal sebagai *bestuurswetenschap*. Ilmu Pemerintahan generasi kedua ini didukung oleh metodologi yang berhasil mengidentifikasi sasaran formal baru (khusus) diantara sejumlah objek formal lainnya yang gejalanya memiliki keajegan yang cukup untuk dianalisis.

Pada tahap kelima, muncul kemampuan denominatif dari Ilmu Pemerintahan. Ketika metodologi Ilmu Pemerintahan digunakan oleh ilmu lain sebagaimana Ilmu Pemerintahan menggunakan metodologi ilmu lain pada saat Ilmu Pemerintahan dikaji sebagai suatu bidang kajian ilmiah (jurusan pada tingkat S1 atau BKU pada tingkat S2) dan jika Ilmu Pemerintahan diakui sebagai disiplin berderajat akademik tertinggi (S3) dan jika Ilmu Pemerintahan dapat diterapkan didalam kehidupan sehari-hari oleh para profesional pemerintahan yang terhimpun didalam suatu asosiasi profesional. Ilmu Pemerintahan generasi ketiga ini di Barat telah berkembang.

Pada tahap keenam, bagian ilmu yang mempelajari pemerintahan (tahap kedua), misalnya sosiologi pemerintahan, berkembang sedemikian pesat sehingga ia dipandang sebagai sebuah disiplin sendiri yang kemudian membentuk Ilmu Pemerintahan generasi keempat (*bestuurswetenschappen*) dengan pendekatan multi disiplin dan lintas-disiplin. Pada tahap ketujuh, *bestuur sweeten schappen* itu jika

berhasil menduduki posisi denominatif, bias balik menyoroti bidang-bidang yang dahulu dikaji oleh induknya. Misalnya dengan menggunakan metodologi sosiologi Ilmu Pemerintahan, Ilmu Pemerintahan generasi keempat mengkaji gejala-gejala atau peristiwa sosiologis. Maka lahirlah disiplin baru seperti Ilmu Pemerintahan sosiologikal dan seterusnya. Pada gilirannya disiplin ini membentuk Ilmu Pemerintahan generasi kelima. Ndraha juga menjelaskan bahwa epistemologi Ilmu Pemerintahan itu mengembangkan konsep hubungan pemerintahan dengan menggunakan pendekatan monodisiplin (*consept analyses and construction*), multidisiplin (memandang suatu konsep/masalah dari berbagai aspek).¹²

Landasan aksiologi adalah manfaat/guna/fungsi dari ilmu pengetahuan yang dimaksud. Landasan aksiologi Ilmu Pemerintahan merupakan manfaat/guna/fungsi dari Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Ndraha mengemukakan fungsi Ilmu Pemerintahan dengan melihat fungsi ilmu pengetahuan yang dikemukakan oleh Fred N. Kerlinger. Ilmu pengetahuan pada umumnya mempunyai dua fungsi, ke luar dan ke dalam.¹³ Ke luar, suatu ilmu pengetahuan berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi suatu objek, merekam dan menggambarkan suatu keadaan, menerangkan hubungan antar gejala, menguji pengetahuan lain dan meramalkan apa yang akan dan dapat terjadi. Kedalam, ia berfungsi sebagai alat untuk menguji dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan bersifat *heuristic*, artinya menemukan, menguji, mengoreksi dan mengembangkan dirinya sendiri sehingga terus-menerus mampu berfungsi. Jika hal tersebut tidak

¹² Loc it., 16

¹³ Ibid., 18-19

terjadi, maka ilmu yang bersangkutan masih lemah (tidak didukung oleh cukup fakta yang konsisiten dan relevan) atau ketinggalan jaman (tidak dapat digunakan sebagai alat untuk menghadapi atau mengantisipasi keadaan, karena zaman sudah berubah) atau tidak *appropriate* (andai kata ilmu diibaratkan alat, maka busi mati tidak bisa dengan kunci inggris). Ilmu Pemerintahan (yang merupakan ilmu pengetahuan) memiliki guna teoritis dan guna praktis. Guna teoritis dari Ilmu Pemerintahan ini dengan mengkaji/ mengembangkan/ mempelajari Ilmu Pemerintahan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sedangkan guna praktis dari Ilmu Pemerintahan ini dengan mengkaji/ mengembangkan/ mempelajari Ilmu Pemerintahan untuk diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Tujuannya untuk melaksanakan fungsi pemerintahan secara maksimal sehingga dapat tercapai kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Pemerintahan

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan menurut Inu Kencana Syafie sebagai berikut:¹⁴

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari unsur rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “Pe-” menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.

¹⁴ Inu Kencana Safie, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013) hlm 8

- c. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Menurut C.F Strong dalam Syafiie Pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang. Yang Kedua, harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang. Yang Ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.¹⁵

Dari pengertian di atas menjelaskan bahwa Pemerintah merupakan organisasi yang memiliki kewenangan untuk memelihara kedamaian yang dilengkapi dengan kekuatan militer, kekuatan membuat undang-undang serta memiliki biaya yang digunakan dalam penyelenggaraannya. Ndhara menjelaskan pemerintah adalah gejala social yang artinya di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terjadi terdapat dalam suatu saat dalam masyarakat.¹⁶

Lebih lanjut menurut Ndhara menjelaskan Pemerintahan merupakan sebuah system multi proses yang bertujuan memnuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa public dan pelayanan sipil. Yang diperintah lanjutnya

¹⁵ Ibid., hlm 10

¹⁶ Loc it., hlm 6

adalah konsumen produk-produk pemerintah, penanggung dampak negative pembangunan, pembayar resiko mismanajemen Negara, pemikul biaya social kegiatan para politisi, kambing hitam kegagalan para penguasa, korban upacara ritual kemenangan elit dalam mempertahankan kepentingannya dan membayar biaya penyelenggaraan Negara serta gaji pemerintah.¹⁷

Menurut Apter dalam Syafiie bahwa Pemerintahan itu adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan system yang mencakupnyaitu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan.¹⁸

Menurut Syarifin dan Jubaedah istilah Pemerintah berasal dari kata “Perintah” berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu negeara (daerah) atau badan yang tertinggi memerintah suatu Negara, seperti cabinet adalah suatu pemerintah.¹⁹

Secara epistimologi dapat diartikan sebagai tindakan yang terus menerus (*continue*) atau kebijaksanaan dengan menggunakan suatu rencana maupun akal (rasio) dan tata cara tertentu yang dikehendaki.²⁰ Dalam pengertian ini mengandung makna bahwa pemerintah merupakan tindakan yang dilakukan secara terus menerus, terencana dan memiliki tujuan.

¹⁷ Loc it., hlm 7

¹⁸ Op cit hlm 11

¹⁹ Pipin Syarifin dan Dedej Jubaedah, *Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2013) hlm 7

²⁰ Ibid., ?

Menurut syafiie pemerintah adalah kelompok orang-orang tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau tidak melakukan sesuatu (*not to do*) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit yang ada di dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.²¹ Istilah pemerintah dengan pemerintahan mempunyai arti yang berbeda. Menurut yain dalam Syarifin dan jubaedah pemerintah adalah jawatan atau aparatur dalam susunan politik. Pemerintah adalah tugas dan kewajiban alat Negara. Penguasa diartikan pula pemerinthanlah yang berkuasa.²²

Dari pengertian pemerintah di atas dipahami bahwa pemerintahan merupakan kumpulan orang-orang atau aparatur pemerintah yang diberi ikekuasaan sebagai penyelenggara tugas dan kewajiban alat Negara. Pemerintahan juga merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka mencapai tujuan bersama. Suradinata dalam Nawawi juga berpendapat bahwa pemerintahan adalah semua kegiatan atau badan-badan publik yang menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara.²³

2.1.3 Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1 Desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat

²¹ Op cit hlm 12

²² Opcit hlm 74

²³ Zaidan Nawawi. Manajemen Pemerintahan. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm 18

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa.²⁴ Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang desa di atas maka desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah di bawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat. Desa merupakan organisasi yang berdiri sendiri dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta mandiri.

Desa merupakan bentukan dan pengembangan konsep asli bangsa Indonesia, meskipun ada kemiripan dengan desa di India yang bernuansa Hindu. Kehidupan masyarakat desa terikat pada nilai-nilai budaya asli yang sudah diwariskan secara turun menurun dan melalui proses adaptasi yang sangat panjang dari interaksi intensif dengan perubahan lingkungan biofisik masyarakat. Kearifan lokal merupakan salah satu aspek karakteristik masyarakat yang terbentuk melalui proses adaptasi yang kondusif bagi kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung di

²⁴ H.A.W Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. (Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo, 2003) hlm 3

dalamnya seyogianya dipahami sebagai dasar dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Kondisi masyarakat pedesaan di Indonesia pada saat ini sangat beragam, mulai dari perilaku berladang berpindah, bertani menetap, desa industri, desa dengan mata pencaharian dominan sektor jasa sampai desa yang dengan fasilitas modern (semi urban dan urban) dapat ditemukan di wilayah Indonesia di era milenium ini.

Mashuri Maschab dalam bukunya yang berjudul “Politik Pemerintahan Desa di Indonesia” memberikan pemaknaan terhadap desa berdasarkan tiga terminologi 102.²⁵ Pertama, pemaknaan desa secara sosiologis, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana di antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Dalam pengertian sosiologis tersebut, desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pemaknaan secara ekonomi, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Dalam pemaknaan kedua ini, desa merupakan satu

²⁵ Mashuri Mashab, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, (Yogyakarta: Polgov, Fisipol UGM 2013) hlm. 1-2

lingkungan ekonomi dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, pemaknaan secara politik, dimana ‘desa’ sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Dalam pemaknaan yang ketiga ini desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”.

Pada tahun 1952 Hadikoesoemo terkait dengan desa terungkap bahwa norma-norma daerah hukum masyarakat itu menurut hukum adat:

- a) berhak mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah.
- b) berhak mengurus dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri.
- c) berhak mengangkat pimpinan atau majelis pemerintahannya sendiri.
- d) berhak memiliki harta benda dan sumber keuangannya sendiri.
- e) berhak atas tanahnya sendiri.
- f) berhak memungut pajak sendiri.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut terdapat keberagaman hukum asli di masing-masing desa yang tersebar di seluruh nusantara ini. Di Sumatera Barat misalnya, ada nagari yang mempunyai tata aturan adat yang khas, demikian juga di tempat lain. Desa mengandung sejumlah kearifan-kearifan lokal (*local wisdom*) yang apabila dicermati nilai yang terkandung dalam kearifan tersebut maka dapat menjadi

suatu kekuatan untuk beradaptasi dengan lingkungan dimana suatu masyarakat berdomisili di suatu wilayah desa. Kearifan tersebut dapat dicermati dari aturan-aturan, norma, tata krama/tata susila, bahasa, kelembagaan, nama dan gelaran, teknologi yang digunakan (konstruksi rumah, tata letak rumah, teknik irigasi, teknik pengolahan tanah dan peralatannya, teknik membuat jalan/ jembatan, teknik perahu dan sebagainya).

Adapun syarat utama dalam pembentukan sebuah desa di wilayah sumatera berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 8 ayat 3 huruf b adalah jumlah penduduknya paling sedikit 4000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga. Pembentukan desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota dengan pertimbangan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.

Sedangkan kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat. Adapun kewenangan desa meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota; dan

- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Selanjutnya peraturan yang lebih khusus terkait mengenai desa diatur pada peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam peraturan tersebut mencantumkan tentang penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat desa.

Pemerintahan desa memiliki peranan signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus diemban pemerintahan desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa warganya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Pemerintahan desa tersebut merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan pemerintahan suatu desa, dibutuhkan pemerintah desa yang menjadi motor pelaksana dari tugas-tugas yang harus dijalankan dalam pemerintahan desa tersebut.

Menurut pasal 1 Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sedangkan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa selaku kepala pemerintahan desa berwenang untuk memimpin pemerintahan desa selama enam 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa akan dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari: sekretaris desa; pelaksana kewilayahan; dan pelaksana teknis. Perangkat desa tersebut diangkat langsung oleh kepala desa dari warga desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati/Walikota. Perangkat desa tersebut akan bertugas untuk membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya selama masa jabatan kepala desa dan akan bertanggungjawab langsung kepada kepala desa.

Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, kepala desa selaku pemerintah desa memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Desa;
- d. Menetapkan peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;

- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasi pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas ataupun tanggungjawab dari seorang kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

- d. Menaati dan menegakkan perturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi, dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset desa;
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan kemasyarakatan di desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan desa di atas, Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;

- c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

2.1.4 Pengembangan

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/ kekuatan/kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pengertian “proses” menunjukkan pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau

kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Priyono & Pranarka menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah *to give power or authority*, pengertian kedua *to give ability to or enable*. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.²⁶

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata ‘*power*’ (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama

²⁶ A. M. W. Pranarka dan Vidhandika Moeljarto, *Pemberdayaan (Empowerment)* dalam Onny S. Priyono dan A.M.W Pranarka (eds). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996) Hlm, 77

pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di atas. Kekuasaan tidak tervakum dan terisolasi. Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi sosial antara manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan pemahaman kekuasaan seperti ini, pemberdayaan sebagai proses perubahan kemudian memiliki konsep yang bermakna. Dengan kata lain, kemungkinan terjadinya proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal.²⁷

- a. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah, pemberdayaan tidak mungkin terjadi dengan cara apapun.
- b. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 57-58

sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Beberapa ahli dibawah ini mengemukakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan:²⁸

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap, kejadian- kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa atas) kehidupannya.

Berbeda dengan pendapat Pranarka, Sumodiningrat menyampaikan: pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia dari pada Barat. Di barat istilah tersebut diterjemahkan sebagai *empowerment*, dan istilah itu benar tapi

²⁸ Ibid, hlm. 59

tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi “daya” bukan “kekuasaan” daripada “ pemberdayaan” itu sendiri. Barangkali istilah yang paling tepat adalah “energize” atau katakan memberi “energi” pemberdayaan adalah pemberian energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri.²⁹

Bertolak pada kedua pendapat diatas dapat dipahami bahwa untuk konteks barat apa yang disebut dengan *empowerment* lebih merupakan pemberian kekuasaan daripada pemberian daya. Pengertian tersebut sangat wajar terbentuk, mengingat lahirnya konsep pemberdayaan di barat merupakan suatu reaksi atau pergulatan kekuasaan, sedangkan dalam konteks Indonesia apa yang disebut dengan pemberdayaan merupakan suatu usaha untuk memberikan daya, atau meningkatkan daya. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep

²⁹ Ambar Teguh Sulistyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004) Hlm, 78-79

pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek.

Menurut Sumodiningrat pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri, meski dari jauh di jaga agar tidak jatuh lagi. Dilihat dari pendapat tersebut berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri, meskipun demikian dalam rangka mencapai kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisikan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi.³⁰

Sebagaimana yang disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:³¹

- a. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.

³⁰ Opcit, Ambar ... Hlm, 82

³¹ Ibid., Hlm, 83

- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

2.1.5 Konsep Kapasitas

Kapasitas merupakan konsep yang menunjukkan kepada kemampuan suatu unit tertentu, seperti individu, organisasi dan sistem. Pemahaman ini bisa dilacak dari berbagai ahli. Diantaranya adalah Milen yang mengemukakan bahwa kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus. Milen menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “fungsi sebagaimana mestinya”, memiliki kaitan dengan tugas-tugas pokok yang ditetapkan dari pekerjaan tim, organisasi atau sistem.³²

Mengacu pada pengertian kapasitas di atas maka kapasitas merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang. Apabila seseorang tersebut menjalankan hak

³² Anni Milen, *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. (Yogyakarta: Pondok Pustaka, 2004), hlm. 12.

dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan sesuai peran yang diembannya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan responsivitas dari kinerja Pemerintahan.

Diketahui juga pengertian tentang kapasitas dari morgan yang mendefenisikan kapasitas sebagai “*capacity is the emergent combination of attributes that enables a human system to create developmental values*” kapasitas dalam penegertian ini juga menunjuk kepada kemampuan untuk melakukan sesuatu, hanya saja lebih memuat sebagai bentuk kombinasi dari berbagai atribut yang menjadi pendorong bagi kinerja suatu system dalam upayanya untuk menciptakan nilai-nilai pembangunan. Morgan dalam Simon juga mengemukakan bahwa terdapat lima karakteristik pokok atau aspek dari kapasitas yaitu :³³

- a. Kapasitas adalah pemberdayaan dan identitas kelengkapan yang dapat mengarahkan organisasi atau kompleks. Agar dapat berkembang dalam cara tersebut, sistem membutuhkan kekuasaan, kendali dan ruang. Kapasitas tersebut dilaksanakan secara bersama sama dengan tindakan masyarakat untuk mempengaruhi kehidupan masing-masing dalam gaya tertentu.
- b. Kapasitas dilakukan dengan kemampuan bersama, hal itu terdiri dari kombinasi antribut-atribut yang membuat sistem berjalan, nilai penyampaian memperkuat hubungan dan memperbarui dirinya sendiri. Dalam istilah yang lain merupakan kemampuan membuat sistem individu, kelompok, organisasi,

³³ Simon sumanjoyo Hutagalung dan Dedy Hermawan. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah* (Yogyakarta: Depublish, 2018), hlm 7-8

kelompok organisasi mampu melakukan sesuatu dengan intens dan efektif serta dalam rangka tertentu.

- c. Kapasitas sebagai wujud atau kondisi yang secara inheren merupakan fenomena sistem (*system phenomenom*). Kapasitas merupakan kelengkapan penting atau sebagai efek interaksi. Hal tersebut muncul sebagai keterlibatan dinamis dari kombinasi kompleks perilaku, sumber daya, strategi dan keahlian, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kapasitas dalam hal ini diperkuat dari posisi system dalam konteks tertentu dan biasanya berkaitan dengan aktivitas kompleks manusia yang tidak dapat hanya dilihat dari perspektif teknis yang eksklusif .
- d. Kapasitas merupakan wujud potensial yang temporer dan sulit dimengerti. Hal itu tentang kondisi laten sebagai posisi oposisi dari energi kinetik. Kinerja, secara kontras merupakan tentang eksekusi dan implementasi atau hasil dari aplikasi atau penggunaan kapasitas. Sesuatu yang *given* dalam kualitas laten ini, bahwa kapasitas tergantung kepada derajat luas yang tidak berwujud yang sulit untuk dipengaruhi, dikelola dan diukur. Sebagai wujud atau kondisi yang dapat menghilang secara cepat dalam struktur yang kecil dalam dan rentan. Wujud potensial ini membutuhkan penggunaan pendekatan yang berbeda dalam pembangunan, manajemen, pengukuran dan monitoring.
- e. Kapasitas adalah tentang penciptaan nilai-nilai publik. Semua Negara, dalam derajat pembangunan mereka masing-masing, memiliki beberapa contoh kapasitas efektif yang menjatuhkan kepentingan publik. Bentuk yang paling

jelas adalah korupsi yang terorganisasikan pemanjaraan institusi public. Pada beberapa Negara, beragam jenis kapasitas yang berkompetisi untuk kekuasaan, kendali dan sumberdaya. Kapasitas dalam hal ini merujuk kepada kemampuan suatu kelompok atau sistem untuk berkontribusi positif terhadap kehidupan publik.

Dari pendapat ahli mengenai kapasitas di atas dapat kita ketahui bahwasannya kapasitas merupakan yang Pertama, kemampuan dari berbagai tingkatan mulai dari individu, kelompok dan organisasi. Kedua, kemampuan ini bertujuan menjamin keberlangsungan kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran, kemampuan tersebut merupakan kombinasi dari berbagai atribut seperti sumberdaya manusianya maupun system yang mendukung kemampuan tersebut.

Salah satu bentuk dari kapasitas adalah pengembangan kapasitas UNDP (*United Nations Development Program*) dan CIDA (*Canadian International Development Agency*) dalam Milen memberikan pengertian peningkatan kapasitas sebagai: proses dimana individu, kelompok, organisasi, institusi, dan masyarakat meningkatkan kemampuan mereka untuk (a) menghasilkan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (*core functions*) memecahkan permasalahan, merumuskan dan mewujudkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dan (b) memahami dan

memenuhi kebutuhan pembangunan dalam konteks yang lebih luas dalam cara yang berkelanjutan.³⁴

Grindle pengembangan kapasitas (*capacity building*) merupakan upaya yang dimaksudkan untuk mengembangkan suatu ragam strategi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas kinerja Pemerintah. Yakni efisiensi, dalam hal waktu (*time*) dan sumber daya (*resources*) yang dibutuhkan guna mencapai suatu *outcomes*; efektivitas berupa kepastian usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan; dan responsivitas merujuk kepada bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tersebut.³⁵

Dalam pengembangan kapasitas memiliki dimensi, fokus dan tipe kegiatan. Dimensi, fokus dan tipe kegiatan tersebut menurut Grindle adalah:³⁶

- a. Dimensi pengembangan SDM, dengan fokus: personil yang profesional dan kemampuan teknis serta tipe kegiatan seperti: *training*, praktek langsung, kondisi iklim kerja, dan rekrutmen;
- b. Dimensi penguatan organisasi, dengan fokus: tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan peran dan fungsi, serta tipe kegiatan seperti: sistem insentif, perlengkapan personil, kepemimpinan, budaya organisasi, komunikasi, struktur manajerial, dan

³⁴ Opcit, hlm 15

³⁵Grindle, M.S., (editor), *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, (Boston, MA: Harvard Institute for International Development,1997), hlm. 128

³⁶ Ibid, hlm 28

- c. Reformasi kelembagaan, dengan fokus: kelembagaan dan sistem serta makro struktur, dengan tipe kegiatan: aturan main ekonomi dan politik, perubahan kebijakan dan regulasi, dan reformasi konstitusi.

Sejalan dengan itu, Grindle menyatakan bahwa apabila *capacity building* menjadi serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan responsivitas, maka *capacity building* tersebut harus memusatkan perhatian kepada dimensi: pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Dalam konteks pengembangan sumber daya manusia, perhatian diberikan kepada pengadaan atau penyediaan personel yang professional dan teknis. Kegiatan yang dilakukan antara lain pendidikan dan latihan (*training*), pemberian gaji/upah, pengaturan kondisi dan lingkungan kerja dan sistim rekrutmen yang tepat. Dalam kaitannya dengan penguatan organisasi, pusat perhatian ditujukan kepada sistem manajemen untuk memperbaiki kinerja dari fungsi-fungsi dan tugas-tugas yang ada dan pengaturan struktur mikro.³⁷

Dalam melakukan pengembangan kapasitas individu, tingkatan kompetensi atau kapasitas individu bisa diukur melalui konsep dari Gross, yang menyatakan bahwa kompetensi yang harus dimiliki aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan adalah sebagai berikut:³⁸

³⁷ Tim Peneliti, *Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*, (Makassar STIA LAN, 2012), hlm. 15

³⁸ Richard M, Steers, *Efektivitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 55

- a. Pengetahuan yang meliputi: pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pekerjaan dan organisasi, konsep administrasi dan metode, dan pengetahuan diri.
- b. Kemampuan yang meliputi: manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi, perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, bekerja dengan orang lain, penanganan konflik, pikiran intuitif, komunikasi, dan belajar.
- c. Tujuan yang meliputi: orientasi tindakan, kepercayaan diri, tanggung jawab, serta norma dan etika.

Sedangkan untuk melihat kemampuan pada level organisasi, dapat digunakan konsep Polidano dalam tim peneliti STIA LAN yang dianggap sangat cocok untuk diterapkan pada sektor publik (Pemerintahan).³⁹ Terdapat tiga elemen penting untuk mengukur kapasitas sektor publik, sebagai berikut:

- a. *Policy capacity*, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.
- b. *Implementation authority*, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.

³⁹ Opcit., Hlm, 19

- c. *Operational efficiency*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai.

1.2 Ulasan Karya

Penelitian ini sangat membutuhkan penelitian terdahulu yang telah diuji kebenarannya, sebagai acuan untuk melihat perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan penulis lakukan, berikut penulis sajikan pada tabel sebagai berikut:

NO	Judul	Identitas	Fokus Kajian
1	Kapasitas Organisasi Dalam Pengembangan Pariwisata Studi Kasus Desa Wisata Kabupaten Bintan	Mimbar Jurnal Penelitian Sosial Politik Vol. 8 No. 1 Juni 2019 Penulis: Okparizan, Dkk	Untuk menganalisis bagaimana mewujudkan kapasitas organisasi yang efektif pada Desa Wisata Kabupaten Bintan

2	<p>Partisipasi Masyarakat Dalam Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Logok dan Desa Serang Kecamatan Bantarkawung)</p>	<p>Politika Vol. 5 No. 2 Oktober 2014</p> <p>Penulis: Chika Chaerunnisa Universitas Diponegoro</p>	<p>Untuk menganalisis bentuk dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat masyarakat dalam program PAMSIMAS di Kabupaten Brebes (Studi Kasus Desa Logok dan Desa Serang Kecamatan Bantarkawung)</p>
3	<p>Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kecamatan Simpur Kabupaten Hulu Sungai Selatan.</p>	<p>Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota. Volume 8 (4): 341-348 Desember 2012</p> <p>Penulis: Taufik Afriadi dan Hadi Wahyono</p> <p>Biro Penerbit Planologi UNDIP</p>	<p>Mengkaji kesenjangan harapan dan realisasi kegiatan PAMSIMAS di Kecamatan Simpur, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan, yang telah diimplementasikan sejak 2008 di tiga desa, yaitu Garungung, Ulin dan Pantai Ulin.</p>

4	Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Melalui Program Peyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Kuantan Hilir Tahun 2016-2017	JOM FISIP Vol. 5 Edisi I Januari – Juni 2018. Penulis: Adel Andriadi Universitas Riau	Untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah kabupaten kuantan singingi melalui program Pamsimas di kecamatan kuantan hilir tahun 2016-2017.
5	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)	Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN) Vol. 5 No. 2 November Tahun 2017 Penulis: Hafiz Lasmana Universitas Maritim Raja Ali Haji	Mengetahui Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Aparatur Desa (Studi Terhadap Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Panggak Laut Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga)

Salah satu desa yang berhasil dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi adalah desa Mekarmulya, Kecamatan Telagong Kabupaten Garu yang mana desa ini merupakan desa dengan keadaan geografis berbukit-bukit dan sebagian besar merupakan lereng yang menyebabkan desa tersebut kesulitan

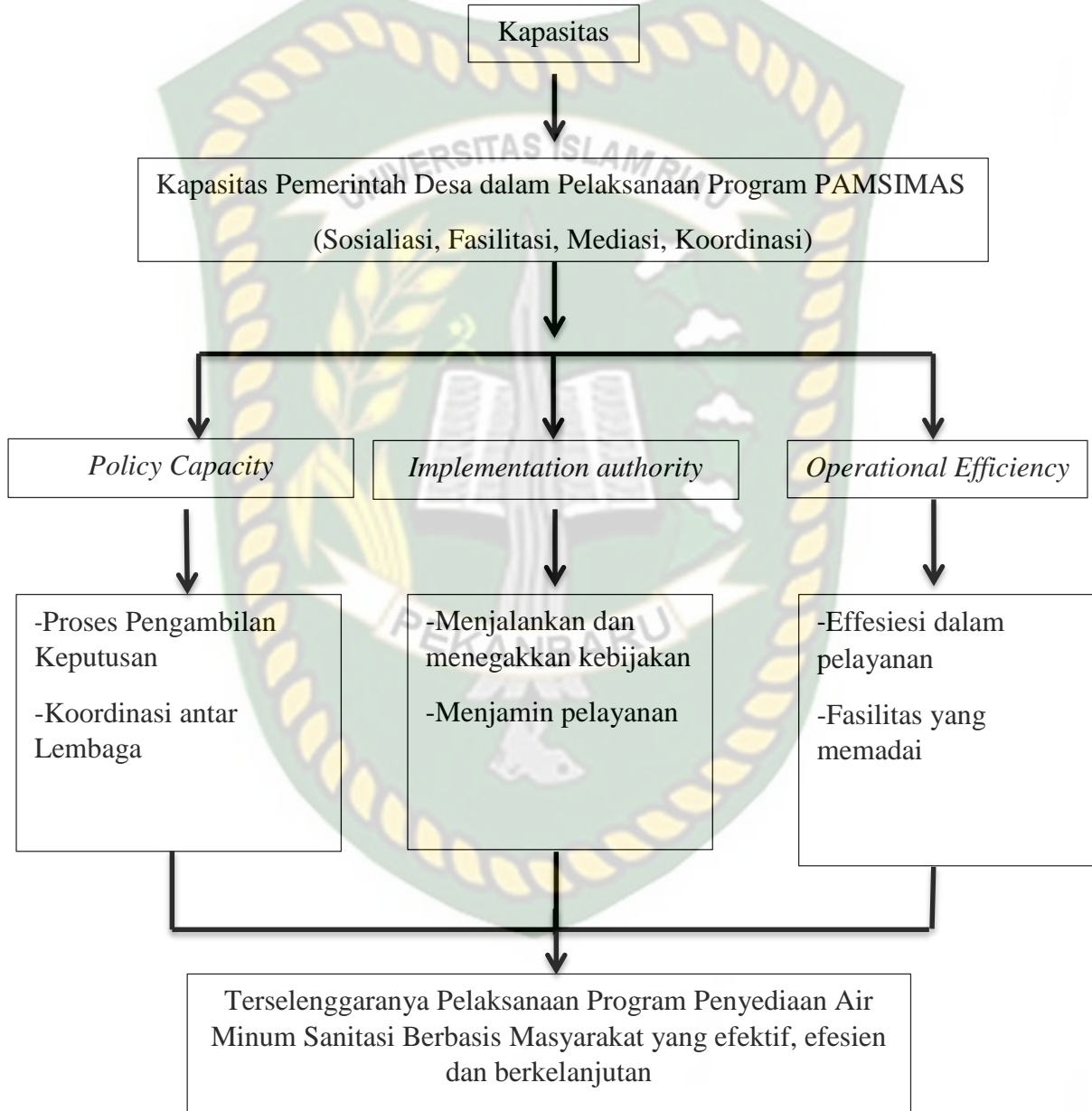
mendapatkan air bersih. Untuk mengatasi hal tersebut menyusun rencana kerja masyarakat sebagai dasar pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Kemudian dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan administrasi, keuangan, teknik serta kesehatan yang memprioritaskan masyarakat yang penerima manfaat sebagai peserta pelatihan yang menjadikan swakelola program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa Mekarmulya tingkat partisipasi masyarakatnya tinggi. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat merupakan relevansi pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang sangat mengedepankan aspek transparansi dan peran aktif dari seluruh warga dalam setiap proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai pada tahap keberlanjutan program.⁴⁰

Dari Penelitian terdahulu di atas mempunyai perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis, dimana penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas pelaksanaan Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis masyarakat hanya sebatas penerapan prinsip *Governance*, pemberdayaan masyarakat, implementasi dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan pada pelaksanaan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat. Kemudian yang membahas kapasitas sangat terbatas dan lebih fokus kepada peningkatan kapasitas. Sedangkan penulis fokus kepada kapasitas Pemerintah Desa yang menggunakan teori

⁴⁰ Windan Jatnika, <http://kapernews.com> diakses pada Minggu 26 April 2020 jam 17:27 WIB

kapasitas sebagai variabel dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis pada program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

1.3 Kerangka Pemikiran



Sumber: Polidano dan Modifikasi Penulis 2019

1.4 Konsep Operasional

Untuk mempermudah mengartikan dan memahami istilah dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu mengoperasionalkan atau memberi batasan penelitian mengenai konsep-konsep dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kapasitas merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang. Apabila seseorang tersebut menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dan sesuai peran yang diembannya untuk meningkatkan efesiensi, efektifitas, dan responsivitas dari kinerja Pemerintahan.
2. *Policy capacity*, yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan, mengkoordinasikan antar lembaga pemerintah, dan memberikan analisis terhadap keputusan tadi.
3. *Implementation authority*, yaitu kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat.
4. *Operational efficiency*, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai.
5. PAMSIMAS adalah singkatan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat. Program Pamsimas merupakan

program andalan pemerintah di dalam penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat bagi masyarakat miskin di pedesaan. Program pamsimas yang di Penulis teliti adalah keberlanjutan program pamsimas yang dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2015 di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.
7. Pemerintah desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

2.5 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian
Milen (2004:12) kapasitas merupakan kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien dan terus menerus.	Kapasitas Pemerintah Desa	<p><i>a. Policy capacity,</i></p> <p><i>b. Implementation authority,</i></p> <p><i>c. Operational efficiency</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proses Pengambilan Keputusan ➤ Koordinasi antar Lembaga ➤ Menjalankan dan menegakkan kebijakan ➤ Menjamin pelayanan ➤ Effesiesi dalam pelayanan ➤ Fasilitas yang memadai

Sumber: Polidano dan modifikasi Penulis 2019



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Metode Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu informan dalam latar ilmiah.¹ Jhon SW. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah di teliti.³

¹ Nanang Martono. *Motode Penelitian sosial: Konsep-konsep Kunci*. (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada:2015) hal 212

²John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 4-5.

³ Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT.Remaja Rosdakaya :2013) hal.11

3.2 Informan Penelitian

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.⁴ Untuk mendapatkan data dan informasi dilakukan dengan cara wawancara kepada aktor-aktor yang bersangkutan dengan penelitian yang dijadikan informan sebagai yang menguasai dan terlibat secara mendalam. Dalam penelitaian ini yang dijadikan inforaman penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan Penelitian

No.	Jabatan	Nama Informan
1.	Kepala Desa	Syamsuir
2.	Sekretaris Desa	Al Ma`rif
3.	Ketua BPSPAM	Azraid
4.	Masyarakat	Nawar
5.	Ketua BPD	Bustami

Sumber : Data Olahan Penulis

3.3 Jenis dan Sumber data

Sumber data adalah semua informasi baik yang merupakan baik yang berupa benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa atau gejala baik secara kualitatif maupun

⁴ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta. Persada Media, 2005) Hlm. 171

kuantitatif.⁵ Dalam penelitian ini, data yang digunakan sebanyak dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dilapangan yang meliputi data yang diberikan oleh informan penelitian. Data primer merupakan data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang keberadaannya hanya digunakan untuk memperkuat, melengkapi, atau mendukung data primer. Data sekunder merupakan data yang berisikan informasi dan teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian. Penulis memperoleh data sekunder dari literatur, buku dan internet, serta data yang diperoleh dari dokumentasi yang dibutuhkan. Seperti:

- a. Profil Desa
- b. Potensi Desa

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut akan menentukan berhasil

⁵ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. (Yogyakarta: Gajah Mada University press. 2004) Hlm. 44

tidaknya suatu penelitian. Sehingga dalam pemilihan teknik pengumpulan data harus cermat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu suatu teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang di gali dari sumber data langsung melalui percakapan atau Tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam supaya informasi yang diperoleh jelas dan valid dari Informan.
- b. Observasi kelapangan untuk memperoleh informasi tentang Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku manusia seperti terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial.⁶
- c. Dokumentasi, yaitu merupakan rekaman kejadian masa lalu yang di tulis atau dicetak, dapat berupa surat, buku harian, notulensi rapat, dan dokumen-dokumen lainnya.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan yang dibutuhkan terkumpul, peneliti memilah dan mengelompokkan data menurut jenisnya, kemudian baru diolah dengan menggunakan model Miles dengan Huberman, yaitu suatu metode yang dipilih

⁶ S. Nasution, *Metode Research*. (Jakarta:PT. Bumi Aksara: 2011) hlm, 106

untuk menganalisa adalah metoda interaktif, yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁷

3.5.1 Reduksi Data

Reduksi Data (*data reduction*) hasil pengumpulan data tersebut perlu direduksi. Istilah reduksi dalam penelitian kualitatif dapat disetarakan maknanya dengan istilah pengelolaan data. Proses mulai dari *editing, coding*, hingga tabulasi data. Ia mencakup kegiatan mengikhtarkan pengumpulan data selengkap mungkin dan memilah-milahnya dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, atau tema tertentu.

3.5.2 Penyajian Data

Penyajian yang dibahas meliputi berbagai jenis matrik, tabel, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang juga sama-sama berguna.

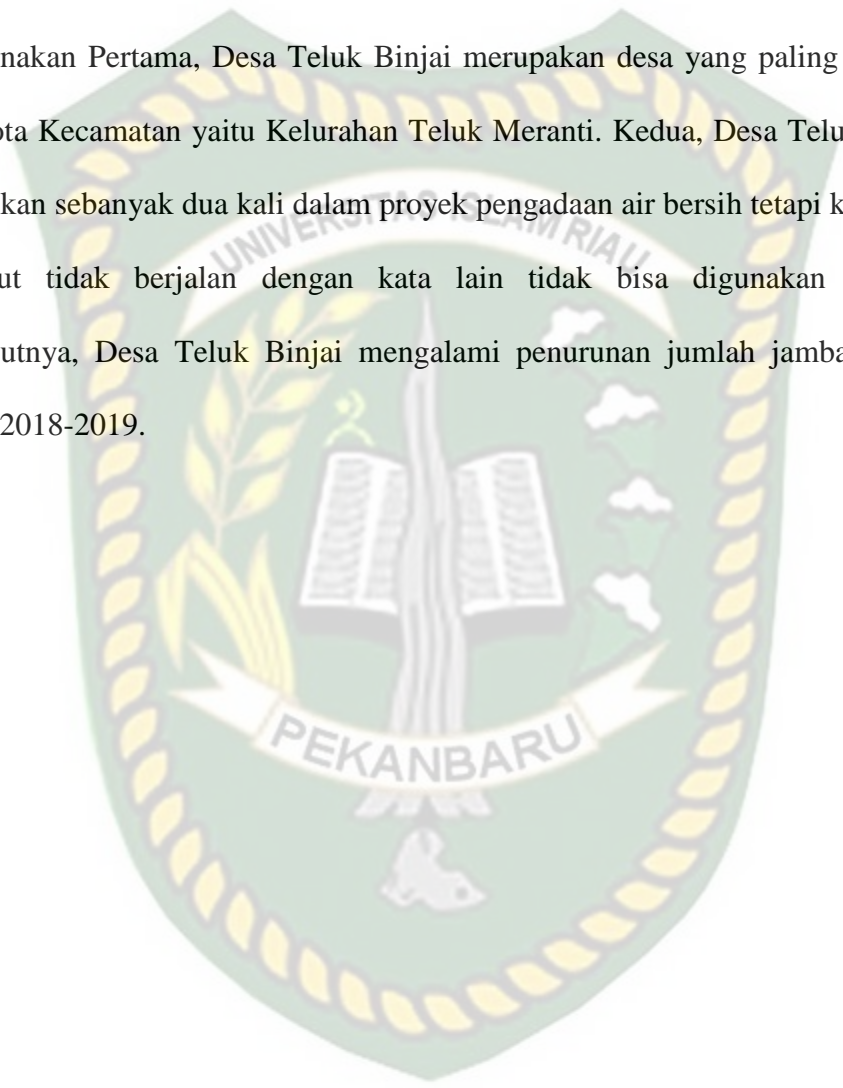
3.5.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam penelitian ini. Disini penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari tahap sebelumnya.

⁷ B. Mathew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UIP, 1992), Hlm, 20

3.6 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Alasan Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan Pertama, Desa Teluk Binjai merupakan desa yang paling dekat dengan Ibu kota Kecamatan yaitu Kelurahan Teluk Meranti. Kedua, Desa Teluk Binjai telah dilakukan sebanyak dua kali dalam proyek pengadaan air bersih tetapi kedua program tersebut tidak berjalan dengan kata lain tidak bisa digunakan sama sekali. Selanjutnya, Desa Teluk Binjai mengalami penurunan jumlah jamban sehat pada tahun 2018-2019.



3.7 Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2019-2020 / Bulan / Minggu															
		Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																
2	Seminar UP																
3	Revisi UP																
4	Riset																
5	Pengolaan dan Analisa Data																
6	Bimbingan Tesis																
7	Perbaikan Bab per Bab																
8	Ujian Tesis																
9	Perbaikan Tesis																

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Program Pamsimas di Desa Teluk Binjai

Desa Teluk Binjai merupakan daerah dataran rendah dengan tipe tanah rawa gambut dengan curah hujan yang tergolong rendah. Sebagian besar warga desa Teluk Binjai tinggal dan bermukim di tepi sungai kampar dan masyarakat tersebut banyak melakukan kegiatan seperti mandi, mencuci dan membuar air besar maupun kecil di sungai tersebut. maka melalui program PAMSIMAS ini akan dilaksanakan pembangunan Bak Penampung Mata Air (PMA) dan akan di proses perseterilan air untuk menanggulangi masalah tersebut. Adapun pembangunan sarana tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan akses terhadap air bersih/minum oleh masyarakat desa.

Sesuai dengan apa yang tercantum dalam buku Pedoman Pelaksanaan Program di Tingkat Masyarakat bahwa tujuan dari program Pamsimas adalah untuk meningkatkan akses pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat perdesaan serta menciptakan perilaku hidup bersih dan sehat melalui program promosi kesehatan di masyarakat dan sekolah melalui 4 hal yaitu

- Perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- Pelayanan Kesehatan Berbasis Lingkungan.

- Penyediaan air minum dan sanitasi yang aman, cukup murah dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat baik kaya/ miskin, laki-laki/ perempuan.
- Kesenambungan dan efektifitas program melalui partisipasi masyarakat.

Di dalam pelaksanaan program pamsimas peran dan tugas pemerintah desa telah dijelaskan secara jelas, peran dan tugas pemerintah di dalam kegiatan pamsimas yaitu melakukan sosialisasi, fasilitasi, mediasi dan koordinasi. Sedangkan tugasnya sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi sosialisasi di desa dan memfasilitasi musyawarah desa dan turut menandatangani daftar hadir sosialisasi di tingkat desa, dalam kapasitas mengetahui;
- b. Turut memfasilitasi musyawarah desa dan menandatangani BA hasil musyawarah desa, dalam kapasitas mengetahui;
- c. Turut menandatangani proposal usulan desa yang ditetapkan oleh masyarakat, dalam kapasitas mengetahui, kemudian mengirimkannya kepada panitia kemitraan;
- d. Turut memfasilitasi forum musyawarah masyarakat tingkat desa untuk membentuk BPSPAMS dengan menetapkan anggota-anggota yang dipilih masyarakat, dan menandatangani hasilnya dalam kapasitas mengenai;

- e. Membantu kelancaran proses persiapan usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dari hasil musyawarah desa;
- f. Turut mengetahui hasil perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pamsimas yang ditetapkan masyarakat di desa ;
- g. Turut menandatangani Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua BPSPAMS, dalam kapasitas mengetahui;
- h. Turut memfasilitasi BPSPAMS untuk pengawasan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan hasil infrastruktur terbangun;
- i. Turut memfasilitasi serah terima pengelolaan aset pamsimas kepada badan pengelola;
- j. Membantu memantau penanganan dan tindak lanjut keluhan yang diterima.

4.1.2. Sejarah dan Monografi Desa

Desa Teluk Binjai merupakan Desa yang dimekarkan dari Desa Teluk Meranti pada tahun 2000, Dinamika pembangunan masyarakat sampai saat ini menunjukkan pertumbuhan yang positif, ditandai dengan keberhasilan pembangunan yang mengalami dari tahun ketahun, seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajibannya, serta meningkatnya kebutuhan yang semakin kompleks merupakan sebuah tantangan bagi Pemerintahan Desa dan kelembagaan juga seluruh komponen

masyarakat untuk meningkatkan pencapaian hasil pembangunan itu sendiri demi menghadapi berbagai permasalahan, tantangan serta perkembangan dimasa kini dan masa mendatang.

Sejak menjadi Desa telah terjadi beberapa kali Pergantian Kepemimpinan di Desa Teluk Binjai dimulai

1. Tahun 2000-2002 H.MSLIM.AR (PJS Kepala Desa)
2. Tahun 2002-2007 SYAMSUIR (Kepala Desa terpilih)
3. Tahun 2007-2014 SYAMSUIR (Kepala Desa terpilih)
4. Tahun 2014-2018 MUSRI EVENDI (Kepala Desa Terpilih)
5. Tahun 2018- 2019 ALIRMAN (PJS Kepala Desa)
6. Tahun 2019-Sekarang SAMSUIR (Kepala Desa Terpilih)

Berikut adalah keadaan Monografi Desa Teluk Binjai arah:

1. Pemukiman : 330 Ha
2. Pertanian : 600 Ha
3. Perkebunan : 1.800 Ha
4. Hutan : 400 Ha
5. Rawa-rawa : 250 Ha
6. Perkantoran : 1,5Ha
7. Sekolah : 1.5 Ha
8. Jalan : 95,5 Ha
9. Lapangan sepak bola : 3 Ha

10. Lahan tidur : 500 Ha

Desa Teluk Binjai memiliki luas Permukiman yaitu 330 Ha yang terbagi menjadi 2 jenis permukiman, ada yang tinggal di pinggir sungai Kampar dan ada juga yang tinggal di daratan yang struktur tanahnya adalah rawa gambut. Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2019 Desa Teluk Binjai memiliki penduduk sebanyak 1799 Orang yang terdiri dari 958 Orang laki-laki dan 841 Orang perempuan. Desa Teluk Binjai Juga memiliki 1 Sekolah dasar dan 3 pendidikan PAUD.

Sedangkan sumber air desa Teluk Binjai adalah sebagai berikut:

1. Pengguna sumur galian : 162 KK
2. Pengguna air PAH : 205 KK
3. Pengguna sumur Dap : 145 KK
4. Pengguna air sungai : 209 KK

Dari data tersebut dapat kita liat bahwasannya penduduk di Desa Teluk Binjai masih banyak menggunakan air sungai sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari padahal air sungai tersebut belum tentu baik bagi kesehatan karena berbagai macam kegiatan dilaksanakan di sungai tersebut seperti mandi, mencuci pakaian dan lain sebagainya

4.2 PEMBAHASAN

Kapasitas merupakan aspek dinamis yang melekat pada suatu jabatan atau system yang dia duduki sesuai dengan dengan tugas-tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan pada bab sebelumnya telah dibahas untuk melihat kapasitas organisasi atau pemerintahan, penulis menggunakan kapasitas yang dikemukakan oleh polidano yang dibagi menjadi tiga bagian yaitu *policy capacity*, *Implementation Capacity* dan *Operation Capacity*.

4.2.1 *Policy Capacity*

Policy Capacity merupakan kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan/kebijakan. Proses pembuatan (formulasi) kebijakan merupakan cara untuk memecahkan suatu masalah yang dibentuk oleh para aktor pembuat kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang ada dan dari sekian banyak alternatif pemecahan yang ada maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik.

Di dalam pelaksanaan Program Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa Teluk Binjai ini tidak berjalan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu Penulis mencoba menanyakan kepada Bapak Syamsuir selaku kepala desa Teluk Binjai mengenai proses kebijakan apa yang telah dibuat atau diambil mengenai pamsimas ini. Yang mengatakan sebagai berikut:

“Untuk sekarang belum ada kebijakan yang kami ambil mengenai pamsimas ini, karena saya baru menjabat menjadi kepala desa pada tahun 2019 ketika anak datang kesinilah baru saya tahu bahwasannya program pamsimas itu ada jadi kalau

untuk proses kebijakan yang belum diambil belum ada ”(Syamsuir, Kepala Desa, Rabu 22 Januari 2020, 9.37 Wib)

Karena ketidaktahuan Kepala Desa mengenai program pamsimas ini penulis mencoba menanyakan kepada informan lainnya yaitu Bapak Al-Ma’arif selaku Sekretaris Desa. Yang mengatakan sebagai berikut:

“Ketika pertama kali program pamsimas dilaksanakan di Desa Teluk Binjai air akan diambil dari dalam tanah, dan dilakukan pemboran pada lima titik tetapi air yang dihasilkan tidak layak pakai. Dan pada akhirnya Pemerintah desa membuat usulan untuk mengolah air sungai menjadi air yang layak untuk diminum dan untuk kegiatan lainnya” (Al-Ma’arif, Sekretaris Desa, Rabu 22 Januari 2020, 10.09 Wib)

Dari hasil wawancara di atas dapat kita pahami bahwasannya Pemerintah desa dalam proses membuat kebijakan mereka mengusulkan terlebih dahulu mengenai proses pengambilan air yang pada awalnya yang berasal dari tanah dirubah menjadi pengambilan air langsung ke sungai yang kemudian diolah menjadi air yang layak untuk dipakai masyarakat. Selanjutnya Penulis juga menanyakan kepada ketua BPSPAMS yang mengatakan sebagai berikut:

“ Ya dulu dalam proses pengambilan kebijakan yang akan kami buat seperti perubahan tempat atau sumber air yang akan ambil pertama-kami melakukan kesepakatan kepada pemerintah desa yang kemudian baru kami sampaikan kepada pendamping kegiatan ini yang dari kabupaten”. (Azraid, Ketua BPSPAMS, Senin 27 Januari 2020, 19.23 Wib)

Dari keterangan Bapak Azraid selaku ketua BPSPAMS mengenai proses kebijakan yang dilakukan sebelum mengambil suatu kebijakan mengenai program pamsimas ini sama dengan yang dikatakan oleh Bapak Sekdes Sebelumnya bahwa

mereka membuat kebijakan pengambilan air yang berubah dari tanah ke sungai. Hal selanjutnya disampaikan berbeda oleh Masyarakat yang Penulis jumpai sebagai berikut:

“ Kami betul-betul tidak tahu apa itu program air minum dan sanitasi yang saudara sampaikan setahu kami itu program PDAM seperti biasa yang dibangun seperti sebelumnya. Jadi kalau ditanya mengenai proses pembuatan kebijakan yang dilakukan mengenai pamsimas ini kami betul-betul tidak tahu” (Nawar, Masyarakat, Kamis 23 Januari 2020, 16.34 Wib).

Ada hal yang menarik menurut penulis dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Nawar mengenai ketidaktahuan mengenai program pamsimas ini. Yang mereka tahu hanyalah kegiatan air bersih seperti biasanya. Hal ini tentunya timbul dari dua kemungkinan yang peratama tidak adanya sosialisasi dari pemerintah atau kurangnya sosialisasi dari pemerintah itu sendiri. Selanjutnya Penulis juga menanyakan kepada Ketua BPD Desa Teluk Binjai yang mengatakan sebagai berikut:

“Sejauh ini belum ada proses kebijakan yang kami lakukan mengenai program pamsimas ini karena sejak awal kegiatan ini dilaksanakan kami dari BPD tidak setuju kegiatan ini dilaksanakan mengingat pada sebelum-belumnya juga sudah pernah dilakukan program air bersih dari pemerintah kabupaten dan tidak berfungsi dan buktinya pamsimas yang dilaksanakan juga tidak berfungsi juga.” (Bustami, Ketua BPD Desa Teluk Binjai, Sabtu 04 April 2020, 15.05 Wib)

Dari pernyataan semua informan tadi penulis menganalisa kurangnya pemahaman dan kepekaan Pemerintah desa mengenai keadaan desa yang sedang ia kelola. Padahal Pamsimas di desa Teluk Binjai dalam status keberlanjutan yang berarti program air minum dan sanitasi di Desa Teluk Binjai belum dikatakan sebagai kegiatan yang telah selesai dilaksanakan, melainkan masih dalam tahap

penyempurnaan kegiatan. Hal tersebut jelas memperlihatkan kurangnya kapasitas Pemerintah Desa Teluk Binjai dalam pelaksanaan program pamsimas.

Berdasarkan observasi penulis ketika turun langsung kelapangan memang kegiatan program pamsimas sudah lama tidak ada sentuhan dari pemerintah karena kondisinya cukup memprihatinkan. Salah satu hal lain menurut penulis yang mempengaruhi dari proses pembuatan kebijakan mengenai pamsimas ini adalah kurangnya dukungan dari BPD sebagai salah satu bagian penting dalam pembuatan kebijakan di desa, sama-sama kita ketahui BPD mempunyai fungsi membahas dan meyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

Di dalam proses pembuatan kebijakan itu sendiri ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Salah satunya adalah mengenai pemahaman terhadap masalah. Pemahaman terhadap masalah dapat membantu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi, mendiaognosis penyebab-penyebabnya, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan yang bertentangan dan rancangan peluang kebijakan baru.

Perumusan masalah merupakan sumber dari kebijakan publik, dengan pemahaman dan identifikasi masalah yang baik maka perencanaan kebijakan dapat

disusun, perumusan masalah dilakukan oleh mereka yang terkena masalah atau orang lain yang mempunyai tanggung jawab dan pembuat kebijakan harus mempunyai kapasitas untuk itu. Proses kebijakan publik dimulai dengan kegiatan merumuskan masalah secara benar, karena keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan perumusan kebijakan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kegiatan ini akan sangat berpengaruh pada proses pembuatan kebijaksanaan seterusnya.

Di dalam kapasitas ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kapasitas organisasi salah satunya adalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur yang bersangkutan padahal kapasitas pengetahuan sangat penting dalam suatu organisasi atau individu, sesuai dengan konsep mengenai pengukuran kapasitas individu salah satunya adalah mengenai pengetahuan, pengetahuan ini meliputi: pengetahuan umum, pengetahuan teknis, pekerjaan dan organisasi, konsep administrasi dan metode, serta pengetahuan diri.

Pengetahuan merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh siapapun terutama pengetahuan mengenai tugas dan fungsi pokok yang melekat pada suatu jabatan tertentu. Apabila yang menduduki jabatan tersebut tidak memahami tugas dan fungsinya maka akan terjadi kurang berfungsinya jabatan atau suatu system tersebut dan akan menyebabkan tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Apabila kita lihat kembali mengenai latar pendidikan aparatur di desa Teluk Binjai juga kebanyakan berasal dari lulusan oleh karena itu peneliti juga melihat adanya keterkaitan antara pendidikan dengan tingkat kapasitas suatu organisasi atau individu.

Di dalam *policy capacity* juga dilihat dari kemampuan Pemerintah dalam mengkoordinasikan antar lembaga yang terkait sehingga suatu tujuan tercapai dengan baik. Menurut Manullang koordinasi adalah usaha mengarahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan dengan adanya koordinasi akan terdapat keselarasan aktivitas diantara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Menurut Manullang koordinasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Empat cara utama dalam usaha memelihara koordinasi adalah sebagai berikut:¹

- Mengadakan pertemuan resmi antara unsur-unsur atau unit yang harus dikoordinasikan. Dalam pertemuan seperti ini, dibahas dan diadakan pertukaran pikiran dari pihak-pihak yang bersangkutan dengan tujuan mereka akan berjalan seiring dan bergandengan dalam mencapai suatu tujuan.
- Mengangkat seseorang, suatu tim atau panitia koordinator yang khusus bertugas melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi, seperti memberi penjelasan atau bimbingan kepada unit-unit yang dikoordinasikan.
- Membuat buku pedoman yang berisi penjelasan tugas dari masing-masing unit. Buku pedoman seperti itu diberikan kepada setiap unit untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

¹ Manullang. Dasar-Dasar Manajemen. Galia Indonesia(GI) : Yogyakarta. 2008 hlm 72-73

- Pimpinan atau atasan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan, konsultasi, dan pengarahan.

Di dalam program pamsimas pemerintah desa mempunyai kapasitas untuk melakukan koordinasi antar lembaga yang bersangkutan. Hal ini dijelaskan pada peran dan tugas Pemerintah Desa yang telah peneliti bahas sebelumnya. Dari hasil wawancara penulis kepada informan dapat kita lihat bagaimana pemerintah desa mengkoordinasikan *stakeholders* dalam pamsimas. Pada awal kegiatan pemerintah desa berkoordinasi dengan BPSPAM dalam perubahan pengambilan air yang akan digunakan dalam program pamsimas. Tetapi menurut hemat penulis dari hasil wawancara tersebut pemerintah desa hanya melakukan koordinasi pada awal kegiatan pamsimas saja yaitu pada tahun pembangunan 2015.

4.2.2 *Implementation authority*

Selain *policy capacity* untuk mengukur sejauhmana kapasitas Pemerintah dalam menjalankan suatu kegiatan atau program adalah dengan *implementation authority*. Implementasi adalah suatu tindakan atau langkah yang diambil dan pelaksanaan dari sebuah perencanaan yang telah ditetapkan yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Menurut Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi

yang efektif.² Sedangkan *authority* yang secara bahasa diartikan kewenangan yang mempunyai makna hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan biasanya terdiri dari beberapa wewenang yang memiliki kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.³

Sedangkan *implementation authority* adalah kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas, dan kemampuan untuk menjamin bahwa pelayanan umum benar-benar diterima secara baik oleh masyarakat. Di dalam program Pamsimas Pemerintah Desa memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Salah satu hak dan kewajiban itu adalah mengenai keuangan program pamsimas yang mana di dalam program pamsimas dana kegiatan bersumber dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan APBD Kabupaten, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dana kontribusi masyarakat.

Salah satu kebijakan yang telah pemerintah tetapkan mengenai sumberdana program pamsimas itu berasal dari pemerintah Desa sebesar 10 % wajib dianggarkan

² Guntur Gunawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, Balai Pustaka. Jakarta, 2004, hlm, 39

³ Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 35

dalam APBDes. oleh karena itu Penulis menanyakan hal tersebut kepada kepala desa Bapak Sayamsuir ang mengatakan sebagai berikut:

“Saya kurang tahu soalnya baru diangkat pada tahun 2019 jadi saya hanya mengikuti musrembangdes untuk tahun 2020 saja. Kalau untuk tahun 2020 tidak ada seperti yang dianggarkan untuk pamsimas. Ya seperti yang saya sebut sebelumnya saya baru tau mengenai ini ketika saudara kesini” (Syamsuir, Kepala Desa, Rabu 22 Januari 2020, 9.37 Wib)

Dari apa yang disampaikan oleh Bapak Syamsuir selaku kepala desa bahwa pemerintah desa tidak ada menganggarkan untuk program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa Teluk Binjai terutama pada tahun 2020. Oleh karena itu penulis juga menanyakan hal yang sama kepada Bapak Ma’arif yang mengatakan sebagai berikut:

“Kalau untuk dana sendiri dalam pelaksanaan pamsimas ini kami tidak ada merencanakannya karena jumlahnya sangat kecil seperti yang saudara sampaikan tadi yaitu hanya 10%. Kalau kita lihat kondisi pamsimas sekarang ini untuk mengaktifkan kembali seperti membutuhkan banyak dana jadi nanti percuma saja kalau kita rencanakan” (Al-Ma’arif, Sekretaris Desa, Rabu 22 Jnauari 2020, 10.09 Wib)

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ma’arif tersebut jelas juga dinyatakan bahwa pemerintah desa Teluk Binjai tidak ada menganggarkan dalam anggaran pendapatan belanja desa dengan alasan kalau untuk mengaktifkan kembali pamsimas itu membutuhkan dana yang cukup besar dan tidak cukup dengan biaya yang sedikit. Kemudian penulis menanyakan lagi pada informan selanjutnya yaitu Bapak Azraid yang mengatakan sebagai berikut:

“Tidak ada kami dapat dana dari Pemerintah Desa. Ya sebenarnya harus ada dana dari pemerintah Desa yaitu 10% untuk kegiatan pamsimas itu sendiri, mungkin karena program pamsimas ini tidak berjalan makanya mereka tidak ada menganggarkan biaya tersebut dalam APBDes mereka.” (Azraid, Ketua BPSPAMS, Senin, 27 Januari 2020, 19.23 Wib)

Keterangan yang diberikan oleh Ketua BPSPAMS tersebut mengatakan bahwa mereka tidak ada menerima dana dari desa untuk pelaksanaan kegiatan program pamsimas. Menurutnya mungkin Pemerintah Desa Teluk Binjai tidak menganggarkan dana kegiatan pamsimas tersebut karena program pamsimas ini tidak berjalan. Berikut keterangan dari Bapak Nawar:

“Mengenai dana itu saya kurang tahu kerena itu urusan pemerintah desa. Kalau ditanya ketika musrenbangdes seingat saya tidak ada kami membahas mengenai hal tersebut.” (Nawar, Masyarakat, Kamis 23 Januari 2020, 16.34 Wib)

Hal yang disampaikan Bapak Nawar tersebut hampir sama dengan informan-informan sebelumnya yang mengatakan bahwa pemerintah tidak ada menganggarkan dana sebesar 10% untuk pamsimas. Kemudian Penulis menanyakan hal yang sama kepada Bapak Bustami yang mengatakan sebagai berikut:

“Seperti yang saya katakan sebelumnya kami dari BPD kurang setuju dengan kegiatan ini mengingat masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan, saya kira masalah air ini belum menjadi hal yang sangat penting pada saat ini untuk Desa Teluk Binjai, karena masalah air untuk saat ini mudah diakses atau di dapat Cuma kualitasnya kurang bagus karena Desa Teluk Binjai ini dikawasan rawa gambut oleh karena itu tidak ada kami membahasnya dalam diskusi atau rapat bersama Pemerintah Desa” (Bustami, Ketua BPD Desa Teluk Binjai, Sabtu 04 April 2020, 15.05 Wib)

Dari keterangan Bapak Bustami tersebut juga jelas dinyatakan Pemerintah Desa Teluk Binjai tidak ada menganggarkan dana seperti yang telah dibahas sebelumnya. Selain itu menurut Penulis ada kekeliruan pemahaman dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Bustami mengenai belum pentingnya permasalahan air di Desa Teluk Binjai padahal berdasarkan observasi penulis kelapangan banyak dijumpai masyarakat Desa yang tidak menerapkan pola hidup sehat yang menyebabkan perusakan lingkungan yang akan berdampak buruk kemudian hari.

Menurut hemat Penulis walaupun sekecil apapun dananya yang berasal dari desa yang direncanakan dalam APBDes setidaknya dana tersebut bisa digunakan untuk perawatan fasilitas air minum dan sanitasi yang telah dibangun pada tahun 2015 tersebut. Di bawah ini adalah kegiatan yang masuk dalam dokumen APBDes Desa Teluk Binjai pada tahun 2019 pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

Tabel 4.1
Jenis Kegiatan pada Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Desa Teluk Binjai Tahun 2019

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah
1.	Pemeliharaan Jalan Desa	800 Meter
2.	Pemeliharaan Jembatan Desa	1 Unit
3.	Pemeliharaan Gorong-Gorong/Derainase	2 keg
4.	Rehabilitasi Balai Adat/ Balai Kemasyarakatan	1 Unit

Sumber: APBDes Desa Teluk Binjai 2019

Data pada tabel tersebut menambah kekuatan pernyataan dari keterangan Bapak Al-Ma'arif yang menyatakan bahwa pemerintah desa tidak ada mengganggu kegiatan yang berhubungan dengan pamsimas. Hal itu tentu bertolak belakang dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah mengenai desa mengalokasikan 10% dari APBDDes untuk program pamsimas. Berikut adalah gambar keadaan fasilitas yang peneliti lihat ketika turun kelapangan untuk memastikan keadaan fasilitas program pamsimas.

Gambar 4.1
Keadaan Bangunan Pamsimas Desa Teluk Binjai



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis

Dari gambar di atas dapat kita lihat betapa tidak terawat dan perlu perhatian khusus dari pemerintah karena akses air minum dan sanitasi sangat penting karena menyangkut kehidupan khalayak ramai dan berpengaruh kesehatan masyarakat.. menurut kementerian kesehatan ketidakbagusan sanitasi atau tidak layak nya sanitasi banyak menyebabkan penyakit yang timbul di dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah diare. Sedangkan di desa Teluk Binjai kasus penyakit diare terjadi pada tahun 2018 berjumlah 2 kasus berdasarkan data pamsimas di <http://mis.pamsimas.org>. Hal ini seharusnya menjadi salahsatu perhatian khusus Pemerintah desa Teluk Binjai.

4.2.3 Operational Efficiency

Operational Efficiency yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai. Pemanfaatan sumber daya menjadi poin kunci untuk mencapai efisiensi. Program ini berperan dalam menyediakan dukungan finansial baik untuk investasi fisik dalam bentuk sarana dan prasarana, maupun investasi non-fisik dalam bentuk manajemen, dukungan teknis, dan pengembangan kapasitas. Untuk melihat efesiensi dalam pelayanan program pamsimas penulis menanyakan kepada Bapak Syamsuir. Yang mengatakan sebagai berikut:

“Kalau untuk melihat tingkat ke efisiensi dalam pelayanan dalam program pamsimas di desa Teluk Binjai ini belum bisa diukur karena program ini kan pada saat ini tidak berjalan lagi” (Syamsuir, Kepala Desa, Rabu 22 Januari 2020, 9.37 Wib)

Menurut Bapak Syamsuir tingkat efisiensi dalam pelayanan program pamsimas ini belum bisa dilihat karena pada saat ini program pamsimas di desa Teluk Binjai tidak berjalan lagi. Menurut hemat penulis apa yang di sampaikan oleh Bapak Syamsuir selaku kepala desa Teluk Binjai tersebut adalah sesuatu yang benar karena untuk melihat efisiensi kita harus membandingkan antara pengeluaran dan yang diterima. Sementara itu penulis juga menanyakan kepada Bapak Al-Ma'arif mengenai efisiensi pelayanan yaitu sebagai berikut:

“Tidak semua masyarakat sadar mengenai pentingnya air bersih dan sanitasi. Dan juga mengurus yang telah ditunjuk tidak paham mengenai tugasnya dengan baik padahal sarana sudah ada hanya tinggal menjalankan saja tapi karena SDM kurang memadai itu lah salah satu penyebabnya” (Al-Ma'arif, Sekretaris Desa, Rabu 22 Januari 2020, 10.09 Wib)

Dari keterangan Bapak sekdes di atas dalam pelaksanaan program pamsimas ini yang salah satu yang mempengaruhi efisiensi pelaksanaan program ini adalah kurangnya Sumber daya manusia dalam pengelolaan program pamsimas padahal sarana dan prasarana telah dibangun sudah tersedia. Sama-sama kita ketahui bahwasannya program pamsimas ini lebih banyak mengambil peran masyarakat dalam pelaksanaannya kerana konsep awal dari program ini adalah berbasis masyarakat yang mengutamakan kesetaraan gender seperti pengurusnya harus dari kalangan kurang mampu dan 50% dari kalangan perempuan. Dari pernyataan ini menarik untuk dibahas menurut peneliti karena untuk melakukan program ini tentunya dibutuhkan kemampuan yang memadai dari sumber daya manusianya yang ditunjuk sebagai pengelola kegiatan pamsimas tersebut.

Selanjutnya dalam *operational efficiency* yang harus dilihat adalah fasilitas yang memadai. Fasilitas yang memadai ini maksudnya adalah fasilitas yang tersedia telah sesuai dan dapat mendukung terlaksananya supaya program berjalan dengan efektif. Karena sama sama kita ketahui bahwa fasilitas yang memadai merupakan salah satu faktor pendorong keefektivan suatu program. Mengenai fasilitas yang memadai dalam program pamsimas di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan peneliti mencoba menanyakan kembali kepada ketua BPSPAMS Desa Teluk Binjai yang mengatakan sebagai berikut:

“Mengenai fasilitas dalam program pamsimas ini, saya rasa tidak ada kekurangannya pada awal pembangunan seperti sudah ada pompa air dan pipa air yang bagus. Memang tinggal menjalankan program ini saja lagi. Seperti air kurang bagus, solusinya diambil dari sungai supaya kualitas air bagus dari pada menyedot air dari dalam tanah yang kurang bagus karena air kuning dan berkarat”(Azraid, Ketua BPSPAMS, Senin 27 Januari 2020, 19.23 Wib)

Dari segi fasilitas program pamsimas di desa Teluk Binjai ini sudah memadai dari pernyataan Bapak Azraid Desa Teluk Binjai seperti mereka mengubah rencana awal bahwa air diambil dari tanah berubah menjadi air sungai supaya kualitas air yang dihasilkan lebih bagus karena air yang diambil dari tanah mempunyai kualitas buruk seperti air kuning dan berkarat tentunya ini akan menyebabkan masalah baru di masyarakat apabila tidak dicarikan jalan keluarnya. Dan juga tentunya konsumen juga tidak ada yang mau ikut serta dalam penyediaan air tentunya, pasti mereka akan memilih alternatif yang lain. Jadi memang tinggal pada pelaksanaannya saja yang terkendala dalam pelaksanaan program pamsimas di Desa Teluk Binjai ini.

Kemudian penulis menanyakan kepada informant lainnya mengenai fasilitas pamsimas di desa Teluk Binjai.

“Masalah fasilitas secara komposisi mungkin sudah lengkap. tapi ya itu tadi tidak berjalan bagaimana kami mau menikmati fasilitas tersebut, dan juga ada juga keluhan warga lain ketika program ini pertama kali dibangun, mereka kecewa jangkauan air bersihnya sangat terbatas dan tidak menyeluruh sampai kerumah warga dan juga bangunan pamsimas ini berada di tepi sungai dan tentunya yang dapat akses cuma masyarakat yang tinggal di tepi sungai saja, karena keterbatasan pipa paralon tadi padahal yang sangat membutuhkan program ini adalah masyarakat yang tinggal di daratan yang air nya berasal dari rawa gambut. Kalau masyarakat yang tinggal di tepi sungai mereka lebih memilih sungai karena gratis dan tentunya praktis dan tidak membutuhkan fasilitas lainnya. ”(Nawar, Masyarakat, Kamis 23 Januari 2020, 16.34 Wib)

Dari keterangan Bapak Nawar tersebut, dia mengatakan belum bisa menikmati fasilitas yang telah dibangun karena belum berjalannya program. Ia juga menyebutkan tidak semua rumah warga dapat dialiri air pamsimas karena keterbatasan pipa paralon yang sangat terbatas. Hal ini menurut penulis menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya kegiatan pamsimas di Desa Teluk Binjai karena dana paling besar itu berasal dari masyarakat itu sendiri. Sama-sama kita ketahui bahwasannya fasilitas yang memadai itu sangat penting bagi terselenggaranya suatu program. Apabila fasilitas sudah memadai maka akan lebih mudah untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga sebaliknya. Selanjutnya Penulis juga menanyakan kepada Bapak Bustami yang mengatakan sebagai berikut:

“Fasilitas yang dibangun pada program Pamsimas ini belum begitu efektif contoh saja untuk pemasangan pipa paralon untuk mengalirkan ke rumah-rumah penduduk dilakukan sendiri oleh masyarakat karena keterbatasan dana dari program pamsimas itu sendiri jadi setiap masyarakat menggali tanah mereka sendiri untuk pemasangan pipa paralon tersebut” (Bustami, Ketua BPD Desa Teluk Binjai, Sabtu 04 April 2020, 15.05 Wib)

Dari keterangan Bapak Bustami tersebut mengenai *operational efficiency* dalam program pamsimas di desa Teluk Binjai ini jelas belum berjalan secara efisiensi. Hal itu terlihat dari penggalian sendiri oleh masyarakat itu sendiri di halaman rumah masing-masing karena tidak adanya biaya yang cukup dari program pamsimas itu sendiri.

Berdasarkan observasi Penulis di Desa Teluk Binjai keadaan rumah penduduk tidak saling berdekatan satu sama lainnya, kebanyakan rumah penduduk di selingi oleh kebun-kebun masyarakat. Oleh karena itu tentunya ini akan menyulitkan penjangkauan pipa paralon itu sendiri, tidak mungkin semua masyarakat mau menggali lobang pipa itu dalam jangka yang panjang sedangkan kepentingan dia sendiri tidak ada mengenai hal tersebut. Tentunya ini menjadi salah satu penghambat bagi pelaksanaan program pamsimas di Desa Teluk Binjai ini.

Dari semua keterangan informan yang penulis tanyakan penulis simpulkan bahwa pelaksanaan program pamsimas di Desa Teluk Binjai ini belum berjalan secara efisien. Hal ini terjadi karena beberapa hal diantaranya yaitu mulai dari SDM sampai dengan fasilitas program pamsimas itu sendiri. Kegiatan pamsimas di Desa Teluk Binjai secara komposisi fasilitas yang dibangun telah lengkap seperti pipa paralon, mesin pompa dan lain sebagainya. Tetapi pada tahap pengelolaannya tidak berjalan

sebagaimana mestinya hal ini sesuai keterangan informan dikarenakan kurangnya Sumber daya Manusia dalam pengelolaannya dan juga kekurangan dana dalam pelaksanaannya. Sama-sama kita ketahui bahwa program pamsimas ini utuh dilaksanakan dengan pendekatan berbasis masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pembiayaan infrastruktur disesuaikan dengan rencana yang dikembangkan oleh masyarakat,
2. Masyarakat yang memilih opsi teknologi untuk infrastruktur air minum,
3. Masyarakat yang mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, serta operasional dan pemeliharaan sarana,
4. Masyarakat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur dan bertanggungjawab penuh terhadap biaya operasional dan pemeliharaan, dan
5. Penerapan pendekatan berbasis gender dan penanggulangan kemiskinan secara konsisten untuk mencapai output dan hasil.

Sedangkan fasilitas program pamsimas di desa Teluk Binjai secara komposisi sudah lengkap tetapi yang menjadi masalah adalah jumlahnya yang kurang atau relatif sedikit yang menyebabkan keterbatasan jangkauan program. Program pamsimas ini sendiri dibangun di tepi sungai karena air yang digunakan adalah air sungai tersebut. Hal ini juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan program pamsimas di desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Karena Penduduk di Desa Teluk Binjai ini tidak semuanya bermukim di tepi sungai.

4.2.4 Faktor Penghambat

Dari pembahasan sebelumnya mengenai pelaksanaan program pamsimas di desa Teluk Binjai Penulis membagi menjadi tiga faktor penghambat utama yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat dan yang kedua kurangnya fasilitas dari pamsimas.

a. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Program Pamsimas membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat karena konsep awal dari program pamsimas ini adalah program berbasis masyarakat baik itu pada tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan program. masyarakat dituntut untuk berpartisipasi dalam program Pamsimas ini, seluruh lapisan masyarakat miskin ataupun kaya, laki-laki maupun perempuan menjadi pelaku utama dan terlibat secara aktif dalam seluruh tahap kegiatan Pamsimas.

Masyarakat di Desa Teluk Binjai kebanyakan atau sebagian besar tinggal di pesisir sungai yang menggantungkan hidupnya menjadi nelayan. Hal ini tentunya membuat masyarakat banyak melaksanakan aktivitasnya menggunakan air sungai mulai dari mencuci dan mandi maupun Buang Air Besar di Sungai. Berikut adalah gambar yang diambil peneliti ketika melihat keadaan Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan.

Gambar 4.2

Kondisi MCK Masyarakat Desa Teluk Binjai



Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis

Dari gambar tersebut dapat kita lihat keadaan MCK di Desa Teluk Binjai ini sangat memprihatinkan karena kegiatan buang air yang dilaksanakan masyarakat langsung masuk kesungai hal ini tentunya mencemari lingkungan dan sangat tidak sesuai dengan program Pamsimas itu sendiri yang dikenal dengan istilah PHBS. PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dilakukan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong diri sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakatnya.

Tujuan utama dari kegiatan pembuangan kotoran manusia yang aman adalah: untuk mengurangi penyebaran penyakit akibat pencernaannya lingkungan oleh kotoran manusia, sehingga terciptanya lingkungan yang sehat. Kotoran manusia banyak mengandung kuman yang dapat menyebabkan diare, dan penyakit menular seperti kolera, tifus, disentri, hepatitis, polio di lingkungan masyarakat yang dapat menyerang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Kebiasaan masyarakat yang masih menggunakan air sungai sebagai MCK ini sangat sulit dirubah.

Menurut analisis penulis ketika melakukan penelitian faktor utama mereka tidak mengikuti program pamsimas ini kerana fasilitas di rumah mereka belum memadai seperti kamar mandi, toilet dan wadah penampungan air, faktor lainnya adalah lebih murah dan praktis menggunakan air sungai karena kegiatan mandi dan mencuci juga dilakukan di sungai jadi airnya langsung tersedia.

Masalah yang paling mendasar masyarakat desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti ini adalah masih kurangnya edukasi tentang pola hidup sehat seperti Stop Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS). Perilaku buang air besar sembarangan merupakan perilaku yang dapat menyebarkan kuman penyakit. Stop BABS adalah suatu kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak melakukan perilaku buang air besar yang berpotensi menyebarkan penyakit. Perilaku stop BABS diikuti dengan pembangunan sarana sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan.

Persyaratan kesehatan sarana sanitasi yaitu:

1. Menjaga lingkungan bersih, sehat, dan tidak berbau
2. Tidak mencemari sumber air yang berada di sekitarnya
3. Tidak mengundang datang lalat atau serangga.

b. Fasilitas Yang Kurang Memadai

Fasilitas yang memadai merupakan faktor terpenting untuk menunjang keberhasilan suatu program. Seperti yang dikatakan informant yang dibahas pada sub bab sebelumnya bahwasannya di Desa Teluk Binjai dalam program pamsimas ini kekurangan pipa paralon yang menghubungkan ke rumah warga.

Dari keterangan Bapak Azraid pipa paralon yang di pasang pada awal pembangunan program pamsimas di Desa Teluk Binjai tersebut hanya menjangkau 2 Km permukiman warga dari mesin pompa air tentu hal ini sangat minim dari jumlah yang sebenarnya yang dibutuhkan di Desa Teluk Binjai ini yang memiliki 3 Dusun dengan luas 330 Ha.

c. Kurangnya Koordinasi

Salah satu peran Pemerintah Desa adalah koordinasi. Koordinasi di dalam pamsimas meliputi banyak hal mulai dari awal program dilaksanakan sampai dengan keiatan pamsimas itu berjalan. Koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan suatu program yang akan dilaksanakan di dalamnya terdiri

dari pembagian tugas yang jelas atau *job description* dan yang paling terpenting adalah dalam koordinasi dibutuhkan pertukaran antara stakeholders satu dengan stakeholders lainnya. Sedangkan koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Teluk Binjai dalam program pamsimas hanya dilaksanakan pada awal kegiatan saja padahal kegiatan pamsimas tetap berlanjut.

4.2.5 Problem Solving

Berdasarkan factor-faktor yang menjadi penghambat dalam kapasitas pemerintah desa dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa Teluk Binjai seperti yang penulis sebelumnya, maka penulis menawarkan beberapa solusi mengenai hal tersebut. Factor yang pertama adalah kurangnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh budaya masyarakat pinggir sungai yang masih memilih sungai untuk melakukan beberapa kegiatan seperti mandi, mencuci serta buang air besar maupun kecil. Menurut penulis hal ini terjadi karena kepraktisan yang diperoleh masyarakat ketika melakukan kegiatan mandi, mencuci, buang air besar maupun kecil di sungai. Mereka tidak perlu memikirkan fasilitas seperti listrik, mesin pompa dan bak penampung air dan lain sebagainya, serta secara financial juga jauh lebih murah. Tentunya ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi pemerintah, salah satu hal yang bias dilakukan adalah mengudakasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi-sosialisasi mengenai pentingnya pola hidup sehat dan bersih.

Solusi selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan menyediakan air yang siap diakses masyarakat karena di desa Teluk Binjai berada di sungai Kampar yang air-nya sewaktu-waktu berubah payau dan cenderung asin. Ketika air berubah menjadi payau bahkan cenderung asin inilah moment masyarakat akan mencari sumber air lain untuk mencuci dan mandi. Dengan demikian masyarakat perlahan akan mengikuti program penyediaan air minum dan sanitasi ini karena tidak ada pilihan lain.

Mengenai kekurangan fasilitas seperti pipa paralon yang terjadi di desa Teluk Binjai ini menurut penulis bias dilakukan pemebelian bertahap yang dilakukan pengelola tentunya bantuan dari pemerintah, baik pemerintah desa maupun daerah. Tidak semestinya sekali pembangunan bias terpenuhi semua fasilitas yang dibutuhkan oleh sebuah program karena program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat ini dana-nya setiap tahun harus dianggarkan oleh pemerintah. Yang terakhir adalah lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa Teluk Binjai. Hal ini menurut Penulis bisa di atasi dengan beberapa cara, cara yang pertama adalah dengan melakukan persamaan persepsi kepada semua *stakeholders* mengenai pentingnya pola hidup sehat dan bersih. Seperti yang terjadi di desa Teluk Binjai, BPD tidak setuju dengan dilaksanakan program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat tersebut. Yang kedua adalah, adanya sikap terbuka dan saling menghargai demi kepentingan masyarakat.

BAB V PENUTUP

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan penelitian pada bab sebelumnya mengenai Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan dapat kita ambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Kapasitas Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Desa Teluk Binjai dilihat dari 3 indikator penilaian. Yang pertama *Policy Capacity*, *Policy Capacity* yaitu kemampuan untuk membangun proses pengambilan keputusan/kebijakan. Mengenai *Policy Capacity* dalam Program Pamsimas di Desa Teluk Binjai ini tidak terlalu banyak kebijakan yang mereka ambil karena ketidaktahuan mengenai permasalahan yang sedang terjadi. kebijakan yang mereka ambil bisa dikatakan hanya sedikit seperti mengambil sumber mata air yang sebelumnya diambil dari tanah kemudian sumber mata air diambil dari sungai yang kemudian diubah menjadi air yang layak untuk digunakan oleh masyarakat.

Yang Kedua yaitu *Implementation Authority*, *implementation authority* adalah kemampuan untuk menjalankan dan menegakkan kebijakan baik terhadap dirinya sendiri maupun masyarakat secara luas. Dalam hal ini

Pemerintah Desa Teluk Binjai dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan mengenai sumber dana program pamsimas dari desa yaitu sebesar 10% tidak ada direncanakan di dalam APBDes dan Pemerintah Desa Teluk Binjai juga belum ada membuat kebijakan apapun mengenai Status Pamsimas yang tidak berjalan di desa tersebut.

Yang Ketiga adalah *Operational Efficiency*, *Operational Efficiency* yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan umum secara efektif/efisien, serta dengan tingkat kualitas yang memadai. Seperti pada tahap sebelumnya Pemerintah Desa Teluk Binjai melakukan perubahan dalam pengambilan sumber air untuk pamsimas dirubah menjadi air sungai tujuan dari itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dari pelayanan pamsimas. Sedangkan dalam segi fasilitas Pemerintah Teluk Binjai merasa sudah bagus tapi hanya kekurangan pipa paralon saja.

- b. Faktor Penghambat, dalam pelaksanaan Perogram Pamsimas di Desa Teluk Binjai Kecamatan Teluk Meranti Kabupate Pelalawan ini terdapat 3 hambatan yang pertama adalah kurangnya partisipasi dari masyarakat. Hal ini menyebabkan tidak berjalannya iuran dari masyarakat sebagai dana pengoperasionalkan program pamsimas. Kurangnya partisipasi masyarakat dipengaruhi juga oleh permukiman masyarakat mayoritas berada di tepi sungai yang mana semua kegiatan banyak dilakukan seperti mandi, mencuci dan buang air. Alasan selanjutnya karena penduduk tidak memiliki fasilitas di rumah untuk penampungan air, kamar mandi dan toilet. Faktor penghambat

yang kedua adalah terbatasnya jangkauan pipa paralon air pamsimas kerumah penduduk yang mengakibatkan warga yang mau ikut menjadi konsumen tidak bisa karena pipa paralon tidak sampai kerumah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kurangnya koordinasi antara stakeholders dalam pelaksanaan program pamsimas di Desa Teluk Binjai.

4.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dan guna melengkapi penelitian ini, maka penulis memberikan beberapa saran sehubungan dengan permasalahan penelitian sebagai berikut:

- a. Hal yang paling mendasar yang harus dilakukan Pemerintah adalah melakukan sosialisasi hidup sehat sebelum pelaksanaan kegiatan program pamsimas seperti perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat yang akan diberikan program pamsimas supaya timbul kesadaran masyarakat akan hidup sehat.
- b. Perlunya kajian secara mendalam untuk memilih desa yang akan diberikan program pamsimas seperti apa hal yang mendasar yang dibutuhkan masyarakat dan apa kendalanya supaya kegiatan yang telah dibangun tidak sia-sia dilakukan dan tepat pada apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bersangkutan.
- c. Perlu adanya peningkatan kapasitas pengelola dalam rangka peningkatan kemampuan pengelolaan Pamsimas dan tentunya Pemerintah Desa Karena

merekalah paling tahu keadaan desanya sendiri, peningkatan kapasitas tersebut salah satunya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan manajerial dalam rangka peningkatan kapasitas pengurus mengenai tata kelola penyediaan air bersih dan manajemen proyek yang merupakan hal penting dikedepankan dalam rencana pengembangan SDM pengelola.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

- Gergeo R, Terry dan Laslie W. 2001. *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Grindle, M.S., (editor). 1997. *Getting Good Government : Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*. Boston, MA: Harvard Institute for International Development
- H.A.W Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo
- J. Moeloeng, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakaya
- Kencana Syafiie, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Kencana Syafiie, Inu. 2003. *System administrasi Negara Republik Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Milen, Anni. 2004. *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas*. Diterjemahkan secara bebas. Yogyakarta: Pondok Pustaka
- Mashab, Mashuri. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Yogyakarta: Polgov, Fisipol UGM
- M, Steers, Richard. 1984. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Manullang. 2004. *Pengembangang Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- Martono, Nanang. 2015. *Motode Penelitian sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada
- Miles, B Mathew dan Michael Huberman..1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta: UIP
- Nasution, S.2011. *Metode Research*. Jakarta:PT. Bumi Aksara
- Sumanjoyo Hutagalung, Simon dan Dedy Hermawan. 2018. *Membangun Inovasi Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Depublish
- Supriyanto, Budi.2009. *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: CV. Media berlian.

Setyawan Salam, Dharma.2007. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan

Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta. Persada Media

Sukandarrumidi.2004. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University press.

Tim Peneliti, *Capacity Building Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*,(Makassar STIA LAN,2012)

W. Creswell, Jhon. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Kencana Safiie, Inu. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Metologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta

Syarifin, Pipin dan Dedej Jubaedah. 2013. *Pemerintahan Daerah di Indonesia* Bandung: Pustaka setia

Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada